



SCAN ME
Website
Memorandum



TIKTOK MEMORANDUM



IG MEMORANDUM



YOUTUBE MEMORANDUM



FB MEMORANDUM

MEMORANDUM

BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

UD SUMBER GUNA HIDUP
JALAN PASAR TURI, PERTOKOAN SINAR GALAXY B84 SURABAYA



TANGGUNG JAWAB BERKUALITAS



PT MAJU JAYA SAKTI SEJAHTERA

SELASA PON, 8 SEPTEMBER 2026

✉ memorandumredaksi@gmail.com

🌐 memorandum.disway.id

📺 MemorandumTV

📺 memorandumonline

📘 memorandum

✂ SKHmemorandum

🎧 memorandum_SKH

HARGA Rp 6.000 • TERBIT 16 HALAMAN



SKH Memorandum Silaturahmi ke Kejati Jatim Perkuat Sinergitas Media dan Penegak Hukum

Surabaya, Memorandum

Keterbukaan informasi dan independensi pers menjadi dua elemen penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Berangkat dari semangat tersebut, jajaran manajemen dan redaksi Surat Kabar Harian (SKH) Memorandum silaturahmi

mi dengan jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, Senin (7/9).

Pertemuan tak sekadar audiensi tetapi juga momentum memperkuat komunikasi antara institusi penegak hukum dan media dalam menyajikan informasi hukum yang

■ Bersambung ke halaman 2



Jajaran pimpinan dan direksi SKH Memorandum foto bersama Kajati Jatim Abdul Qohar Affandi serta unsur asisten Kejati Jatim.

Payung Debu

BANDARA “dibuang sayang” Kertajati akhirnya ada gunanya. Pesawat Garuda dari Jeddah akan mendarat di Kertajati lantaran Soekarno-Hatta ditutup akibat abu letusan gunung Anak Krakatau kemarin.

“Bandara Jakarta tutup” adalah bencana tersendiri. Indonesia terlalu tergantung pada Jakarta. Lebih 300 penerbangan batal mendarat di Jakarta (Cengkareng dan Halim). Itu adalah berita duka yang mendalam. Utamanya dilihat secara ekonomi.

Bertubi-tubi bencana datang: kebakaran hutan, gempa bumi dan kini debu vulkanik. Nilai kerugian ekonomi semua itu ratusan triliun rupiah.

Debu vulkanik memang sangat dihindari penerbangan. Beda dengan asap. Debu vulkanik bisa membuat mesin pesawat tiba-tiba mati.

Anda sudah tahu: debu vulkanik halus sekali. Keras sekali. Seperti batu. Begitu masuk mesin-pesawat benda keras itu mencair --terkena suhu yang sangat panas. Lalu mengganggu sistem udara. Mesin mati. Itu pernah dialami pesawat Boeing 474 British Airways di saat Gunung Galunggung di Jabar meletus. Pesawat itu jurusan

■ Bersambung ke halaman 2

Jennifer Fukuhara Konten Kreator

Jennifer Fukuhara membangun karier di dunia entertainment sejak usia 6 tahun hingga berhasil meraih gelar *1st Runner Up Miss Grand Jawa Timur 2025*. Dara kelahiran 5 Agustus 2004 itu mengawali perjalanannya dari panggung *kids* model sebelum menekuni *endorsement* dan *content creation* saat duduk di kelas 3 SMP.

Jennifer mengaku awalnya tidak berencana menjadi *influencer*, tetapi berbagai tawaran dari brand membuatnya terus menekuni dunia tersebut.

“Awalnya tidak berencana, tapi karena banyak tawaran brand jadi lanjut sampai sekarang. Dan saya juga menikmati profesi ini sebagai *passion* di dunia *content creation*,” ungkap pemilik akun Instagram @jenniferfukuhara tersebut.

Menurut Jennifer, dunia entertainment dan digital menuntut energi positif serta profesionalisme karena harus selalu memberikan penampilan terbaik. “Dunia yang

■ Bersambung ke halaman 2



Petugas mengambil sampel untuk mengetahui kondisi kualitas air sekaligus menelusuri perkembangan pencemaran di sepanjang aliran sungai.

Kadar Fosfat di Ambang Batas

TIDAK hanya kondisi air yang bau dan berbusa, ribuan ikan juga mengapung hingga mati massal di aliran Kali Jagir, Surabaya. Peristiwa ini mendadak menyita perhatian warga bantaran sungai, bahkan tak sedikit masyarakat yang nekat turun ke air demi memburu ikan-ikan yang mabuk hingga diperjualbelikan.

Kejadian ini mendapat sorotan tajam dari lembaga pemantau lingkungan, Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton). Peneliti Ekologi Ecoton, Alaika Rahmatullah, menduga fenomena ikan mabuk dan mati ini

dipicu oleh pencemaran limbah yang masuk ke sungai di tengah penurunan debit air musim kemarau. Berdasarkan hasil pengujian di lapangan, Alaika

■ Bersambung ke halaman 2



Alaika Rahmatullah dari Ecoton mengecek kondisi air di pintu air jagir

Deterjen Wings Cemari Kali Surabaya

2.000 Ton Bahan Baku Mengalir

Surabaya, Memorandum

Kondisi air baku Kali Surabaya yang bau dan berbusa dan dikeluhkan warga diduga dari 2.000 ton bahan baku deterjen di gudang PT Wings Surya.

Sebab, dalam memadamkan kebakaran itu, sebanyak 12 unit kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan. Karena bahan baku terdiri dari soda absen, sodium karbonat, SLS, dan culet sehingga damkar menggunakan *foam* (bahan pemadam kebakaran berbentuk busa, red) dan airnya mengalir ke Kali Tengah hingga

Kali Surabaya yang selama ini dikonsumsi warga Surabaya.

Kapolsek Driyorejo Kompol Gatot Setyo Budi mengatakan, kebakaran terjadi di gudang penyimpanan kristal bahan baku deterjen berukuran 29 x 30 meter dengan kapasitas 2.000 ton.

“Iya benar kebakaran di PT

■ Bersambung ke halaman 2

Data & Fakta Kali Surabaya Berbusa

1



Kali Surabaya sempat berbusa putih, keruh, dan berbau sehingga memengaruhi kualitas air baku Perumda Air Minum Surya Sembada.

2



PJT I masih menguji sampel laboratorium; dugaan awal berkaitan dengan penggunaan foam saat pemadaman kebakaran gudang di Driyorejo.

3



Sampel diambil di hulu dan muara Kali Tengah, intake Karangpilang, Gunung Sari, serta intake Ngagel.

4



Aliran dari Bendung Mirip dinaikkan dari sekitar 20 m³/detik menjadi 25 m³/detik untuk membantu penggelontoran.

5



Perumda menyatakan hingga Senin (7/9) belum menerima laporan warga mengalami gangguan kesehatan akibat air keruh tersebut.

Anak di Bawah Umur Masuk Kelab Malam dan Konsumsi Miras

Surabaya, Memorandum

Pengawasan tempat rekreasi hiburan umum (RHU) di Surabaya kembali menemukan pelanggaran. Satu anak di bawah umur didapatkan masuk ke kelab malam dan mengonsumsi minuman beralkohol.

Temuan itu menjadi perhatian karena tempat hiburan malam masih kecolongan menerima pengunjung yang belum memenuhi batas usia.

Selain anak tersebut, Satpol PP Surabaya menemukan delapan pengunjung berusia 18 hingga 20 tahun yang juga mengonsumsi minuman beralkohol di lokasi.

Kesembilan orang itu kemudian diamankan untuk didata dan menjalani sanksi administratif berupa kerja sosial

di liponsos. Informasi yang dihimpun, pengawasan dilakukan

■ Bersambung ke halaman 2



CINTA YANG TAK PERNAH DIPERJUANGKAN (2)

Bertahan Lama Namun Berujung Pahit



+ Meng, 2.000 ton deterjen Wings cemari Kali Surabaya.

- Sungainya dicuci, tanggung jawabnya dilarutkan.

Si Mameng

(Pengusaha laundry)



Roda waktu berputar kejam, membawa mereka melangkah bersama menapaki gerbang perguruan tinggi di almamater yang sama.

Mereka tumbuh dewasa beriringan di bawah langit yang sama. Melewati terjalnya tugas-tugas kuliah, percekocokan kecil yang merajut rindu, hingga perlahan meraba masa depan di dunia kerja yang kejam.

Hubungan yang dulunya disembunyikan karena usia yang masih hijau, kini telah meno-



rehkan jejak bertahan-tahun lamanya. Namun, di balik megahnya waktu yang berjalan, ada satu karang tajam yang tak pernah bergeser sejauh apapun ia melangkah dalam pelukan malam.

Sasa tetaplah seorang bayangan, tak pernah sekalipun digandeng Umar untuk melangkah melewati pintu rumahnya, diperkenalkan secara resmi sebagai wanita pilihan hati. Malam itu, di bawah temaram lampu kota yang menjadi saksi bisu kepedihan, pertahanan Sasa runtuh sudah, meleleh bersama tetes air mata.

■ Bersambung ke halaman 2



SELASA PON, 8 SEPTEMBER 2026

Deterjen Wings Cemari Kali Surabaya

Wings Surya. Gudang penyimpanan kristal bahan baku deterjen ukuran 29 x 30 meter berisi bahan baku soda absen, sodium karbonat, SLS dan culet dengan kapasitas penyimpanan kurang lebih 2000 ton,” kata Kompok Gatot kepada *Memorandum*, Senin (7/9).

Perumda Surya Sembada Minta PjT I Transparan

Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya mempertanyakan kinerja Perum Jasa Tirta (PJT) I terkait parameter pencemaran. Di mana meski mengklaim bahwa kondisi air baku telah membaik namun hingga Senin (7/9), manajemen Perumda belum memegang hasil lengkap pemeriksaan laboratorium air baku Kali Surabaya.

Manajer Tata Usaha dan Humas Perumda Air Minum Surya Sembada, Louis Andilun Gatu, mengatakan kondisi air baku saat ini sudah membaik. Namun, pemeriksaan parameter air baku berada pada kewenangan PJT I. “Untuk air baku alhamdulillah sudah membaik. Untuk parameter air baku lengkap itu ada di PJT I,” kata Louis diwawancara *Memorandum*, Senin (7/9).

Sementara itu, Perumda Air Minum Surya Sembada memiliki hasil pemeriksaan laboratorium yang berkaitan

dengan air bersih atau air produksi setelah melalui proses pengolahan. “Kalau air bersih atau air produksi yang lengkap lab kami. Jadi lebih pas itu dari lab air baku PJT,” kata Louis.

Menurut dia, pemeriksaan air baku dan air produksi memiliki standar serta fungsi yang berbeda. Air baku sungai menjadi bagian yang dipantau sebelum masuk ke proses pengolahan, sedangkan Air Minum Surya Sembada memastikan kualitas air setelah melalui proses pengolahan untuk kemudian didistribusikan kepada pelanggan.

Louis juga menyampaikan hingga kini tidak ada laporan gangguan kesehatan masyarakat yang masuk ke Perumda akibat kejadian tersebut. Termasuk laporan mengenai gatal-gatal atau keluhan kesehatan lain setelah air mengalami perubahan warna, bau, dan muncul busa.

“Tidak ada laporan kesehatan terkait air keruh yang masuk ke kami, karena masyarakat sudah memiliki kesadaran untuk tidak menggunakan air keruh dan membunganya,” jelasnya.

Namun, kejadian tersebut memunculkan perhatian terhadap mekanisme pencegahan pencemaran air baku sebelum air masuk ke instalasi pengolahan. Louis mengatakan Perumda selama

Sambungan dari halaman 1

ini membayar air baku kepada PJT I. Karena itu, pihaknya berharap kualitas air baku yang diterima sesuai dengan kualitas yang telah ditetapkan.

“PDAM ini kan tidak gratis mengambil air. Dari kita membayar itu, bayarnya ke siapa? Ke Jasa Tirta,” katanya.

Menurut Louis, Perumda Air Minum Surya Sembada seharusnya mendapatkan air baku sesuai kelas yang telah ditentukan. Ia menyebut air baku yang dibeli Perumda merupakan air kelas dua, tetapi dalam kondisi tertentu kualitas yang diterima dinilai dapat berada di bawah harapan. “Kita itu beli air itu harusnya kelas dua. Kelas dua, tapi yang kita terima kelas tiga, kelas empat,” ujarnya.

Penambahan Debit Air dari Bendung Mlirip

Perum Jasa Tirta (PJT) I masih memeriksa laboratorium terhadap sampel air Kali Surabaya menyusul penurunan kualitas air yang ditandai munculnya busa putih di permukaan sungai. Hingga Senin (7/9) siang, hasil uji laboratorium tersebut belum selesai dan masih dalam proses pemeriksaan di laboratorium PJT I.

Kepala Sub Divisi Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Wilayah Sungai

(WS) Brantas 3 Perum Jasa Tirta I, Agung Wicaksono, membenarkan bahwa pihaknya telah melakukan pengujian terhadap sampel air.

“Ada (uji laboratorium),” kata Agung saat dikonfirmasi *Memorandum* mengenai langkah PJT I untuk mengetahui kondisi kualitas air Kali Surabaya.

Namun, ketika ditanya mengenai hasil pemeriksaan tersebut, Agung menyebut hasilnya belum dapat disampaikan karena masih dalam proses analisis. “Hasilnya masih diperiksa ini, di lab kami. Masih pemeriksaan,” ujarnya.

PJT I sebelumnya melakukan pemantauan dan pengambilan sampel air di sejumlah titik setelah muncul indikasi

penurunan kualitas air Kali Surabaya. Pengambilan sampel dilakukan di lima titik meliputi hulu Kali Tengah, muara Kali Tengah, intake Karangpilang, Gunungsari, hingga intake Ngagel.

Langkah tersebut dilakukan karena Kali Surabaya menjadi salah satu sumber air baku yang dimanfaatkan untuk kebutuhan air bersih masyarakat Surabaya. Berdasarkan informasi awal, penurunan kualitas air Kali Surabaya diduga berkaitan dengan kegiatan pemadaman kebakaran di salah satu gudang penyimpanan bahan baku di kawasan industri Driyorejo pada Jumat (4/9).

Dalam proses pemadaman, petugas

menggunakan foam atau bahan pemadam berbusa. Lokasi kejadian berada di sekitar aliran Kali Tengah yang kemudian bermuara ke Kali Surabaya. Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang tengah dipantau untuk mengetahui apakah terdapat keterkaitan antara kegiatan pemadaman kebakaran dengan perubahan kualitas air di Kali Surabaya.

Namun, dugaan tersebut belum dapat disebut sebagai penyebab pasti sebelum hasil pemeriksaan laboratorium selesai. Sembari menunggu hasil laboratorium, PJT I telah melakukan sejumlah langkah operasional untuk membantu mempercepat pemulihan kondisi Kali Surabaya. (**rez/alf/fer**)

Anak di Bawah Umur Masuk Kelab Malam dan Konsumsi Miras

di tiga RHU pada Sabtu (5/9) malam. Lokasi yang menjadi sasaran antara lain Ibiza dan Ambyar Superclub Surabaya.

Kabid Penegakan Perda Satpol PP Surabaya Rizal Zainal Arifin mengatakan, dari tiga tempat yang diperiksa, petugas menemukan pelanggaran di dua lokasi berbeda. Salah satunya terkait pengunjung yang belum memenuhi ketentuan usia untuk mengonsumsi minuman beralkohol.

“Usianya 17 tahun, ada satu. Kemudian ada delapan orang yang usianya sudah 18 tahun tetapi kurang dari 21 tahun. Ternyata faktanya mereka minum di situ,” kata Rizal, diwawancara *Memorandum* pada Senin (7/9).

Kesembilan pengunjung tersebut dibawa ke mako Satpol PP Surabaya. Mereka didata dan diberikan sanksi administratif berupa kerja sosial selama sehari di liponosos. Untuk pengunjung berusia 17 tahun, orang tuanya dipanggil untuk menjemput. Anak tersebut diketahui merupakan warga luar Surabaya. Sementara delapan pengunjung lainnya juga diminta membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi

perbuatannya.

Rizal menegaskan, pengawasan dilakukan untuk mencegah anak-anak dan kelompok usia yang belum diperbolehkan mengonsumsi minuman beralkohol masuk ke tempat hiburan malam.

Menurut dia, minuman beralkohol merupakan barang dalam pengawasan sehingga peredarannya memiliki ketentuan yang harus dipatuhi pelaku usaha. “Anak di bawah umur itu tidak boleh masuk ke tempat hiburan, apalagi klub malam. Kita melindungi jangan sampai anak-anak mengakses tempat hiburan seperti itu,” ujarnya.

Pelanggaran lain ditemukan di sebuah usaha bar. Petugas mendapati izin penjualan minuman beralkohol untuk diminum di tempat telah kedaluwarsa. Atas pelanggaran tersebut, Satpol PP melakukan tindakan pro justitia untuk diproses melalui tindak pidana ringan (tipiring). Sebanyak 10 botol minuman beralkohol golongan B dan C disita sebagai barang bukti.

KTP penanggung jawab tempat usaha juga diamankan untuk melengkapi proses pengajuan perkara ke

Sambungan dari hal 1

persidangan.

Rizal menjelaskan, kewenangan penindakan tersebut mengacu pada Perda Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian. Aturan itu mengharuskan pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol memiliki perizinan berusaha sesuai ketentuan.

Barang bukti yang disita nantinya diajukan dalam persidangan. Jika telah mendapat putusan pengadilan, minuman beralkohol tersebut dapat dimusnahkan sesuai ketentuan.

Pengawasan RHU, lanjut Rizal, akan terus dilakukan. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah kejadian kriminal maupun kecelakaan yang dipicu konsumsi minuman beralkohol.

Sebelumnya, terdapat kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa di Jalan Gubernur Suryo serta kasus penganiayaan setelah perselisihan di kawasan Kedungdoro yang turut berkaitan dengan konsumsi minuman beralkohol.

“Karena kemarin juga ada kejadian itu, kita meminimalisir kejadian-kejadian yang serupa,” pungkasnya. (**alf/fer**)

Perkuat Sinergitas Media dan Penegak Hukum

akurat, berimbang, serta mudah dipahami masyarakat.

Rombongan SKH *Memorandum* diterima Kepala Kejati (Kajati) Jawa Timur Abdul Qohar Affandi. Dalam pertemuan itu, kajati didampingi Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Muhammad Ali Akbar, Asisten Intelijen (Asintel) Pri Wijeksono, serta Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) Ko Triskie Narendra.

Sementara jajaran SKH *Memorandum* terdiri dari Direktur Syaikh Choirul Shodiq, Direktur Ahmad Syaiku, Pemimpin Redaksi Sujatmiko, Penasihat Kemitraan Budi Laopan, Executive Editor & Business Development Anis Tiana Pottag, Koordinator Liputan Muchlis Darmawan, serta wartawan Jaka Santanu Wijaya.

Kajati Jatim Abdul Qohar Affandi menyambut positif kunjungan jajaran *Memorandum*. Ia menegaskan, media memiliki posisi strategis sebagai jembatan informasi antara aparat penegak hukum dengan masyarakat.

Menurutnya, kerja penegakan hukum membutuhkan komunikasi publik yang baik agar informasi yang diterima masyarakat tidak terpotong, keliru, maupun menimbulkan persepsi yang berbeda dari fakta sebenarnya.

“Media mempunyai peran yang sangat penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karena itu, komunikasi dan sinergitas antara Kejaksaan dengan media perlu terus dijaga,” ujar Abdul Qohar.

Ia menilai hubungan yang sehat antara penegak hukum dan media menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik. Keterbukaan informasi, menurutnya,

harus berjalan seiring dengan komunikasi yang intensif dan profesional.

“Dengan komunikasi yang baik, informasi yang disampaikan kepada masyarakat juga bisa lebih tepat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman,” lanjutnya.

Direktur Utama SKH *Memorandum* Choirul Shodiq mengatakan, audiensi tersebut merupakan bagian dari komitmen *Memorandum* untuk terus membangun komunikasi dan hubungan kelembagaan yang konstruktif dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk institusi penegak hukum.

“Kami datang untuk bersilaturahmi sekaligus memperkuat sinergitas. *Memorandum* tentu berkomitmen untuk terus menyajikan pemberitaan yang informatif, berimbang, dan memberikan edukasi kepada masyarakat,” kata Choirul Shodiq.

Ia menegaskan, hubungan media dan aparat penegak hukum memiliki peran yang saling melengkapi. Media membutuhkan akses terhadap informasi yang akurat untuk menjalankan fungsi jurnalistik, sementara institusi penegak hukum membutuhkan saluran komunikasi yang kredibel untuk menyampaikan kinerja serta perkembangan penanganan perkara kepada publik.

Karena itu, Choirul berharap komunikasi yang selama ini telah terbangun antara *Memorandum* dan Kejati Jatim dapat terus diperkuat. “Komunikasi harus terus dibangun. Kami berharap hubungan yang sudah baik ini ke depan semakin erat dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Direktur SKH *Memorandum* Ahmad Syaiku menambahkan, penguatan

Sambungan dari halaman 1

sinergi dengan aparat penegak hukum tidak berarti mengurangi sikap kritis maupun independensi media. Menurutnya, kedekatan komunikasi justru penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar, terverifikasi, dan berimbang.

“Sinergitas bukan berarti menghilangkan independensi media. Justru dengan komunikasi yang baik, kita bisa bersama-sama memberikan informasi yang benar dan mencerdaskan masyarakat,” tegas Ahmad Syaiku.

Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Sejumlah pandangan mengenai pentingnya keterbukaan informasi, komunikasi publik, serta peran media dalam mengawal isu penegakan hukum turut menjadi bagian dari perbincangan.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi pijakan untuk memperkuat hubungan profesional antara SKH *Memorandum* dan Kejati Jatim. Bagi *Memorandum*, membangun komunikasi yang sehat dengan institusi penegak hukum merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas jurnalistik. Namun sinergi tersebut tetap berjalan dalam koridor independensi pers, keberimbangan informasi, serta kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik.

Dengan komunikasi yang terbuka, media dan penegak hukum diharapkan dapat menjalankan perannya masing-masing secara profesional: penegak hukum bekerja menegakkan keadilan, sementara pers menjalankan fungsi kontrol sosial dan memastikan publik memperoleh informasi yang akurat, kritis, dan dapat dipertanggungjawabkan. (**jak/fer**)

Sambungan dari halaman 1

koneksi.

“Kita bisa mencoba banyak hal baru dan bertemu orang-orang hebat. Hal itu sangat berguna untuk menambah koneksi dan kenalan,” pungkasnya. (**mtr/fer**)

Konten Kreator

saya tekuni ini harus selalu ceria karena bertemu dengan banyak orang. Kita dituntut untuk selalu tampil all out,” jelasnya.

Kerja keras itu kemudian berbuah prestasi setelah Jennifer meraih gelar

1st Runner Up Miss Grand Jawa Timur 2025. Selain prestasi, Jennifer menyebut pengalaman berkarier di industri kreatif memberinya kesempatan untuk belajar, mencoba berbagai hal baru, dan memperluas

Payung Debu

Sidney-London. Melintas di atas Jabar. Tinggi sekali: 47.000 kaki.

Tentu arah angin juga menentukan bandara mana saja yang terimbas kali ini: Lampung, Cengkareng, Halim, Pondok Cabe dan Bandung.

Semoga Kertajati benar-benar aman. Tapi karena Garuda dari Jeddah itu datang dari arah barat jangan sampai tidak aman. Mungkin saja jalur terbangnya diubah sedikit, melengkung ke utara dulu, tidak melintas di utara Jakarta.

Tentu banyak orang Jakarta yang mau mendarat di Kertajati --daripada tidak bisa pulang. Dari Kertajati hanya perlu dua jam pakai mobil ke Jakarta. Maka bisa jadi Kertajati jadi tujuan darurat semua penerbangan domestik menuju Jakarta.

Saya sendiri langsung batal ke bandara Cengkareng. Begitu selesai

olahraga saya putuskan ke Surabaya jalan darat. Kemarin saya senam bersama Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta.

Saya pun pamit ke Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Ketua Umum PSMTI, Willianto Tanta yang jadi tokoh sentral kemarin pagi. PSMTI memang sedang Munas di Jakarta.

Tim sepakbola Persebaya juga harus meninggalkan Lampung lewat jalan darat, naik feri, sambung bus.

Salah satu daya tarik jalan darat adalah: lewat Tegal. Berarti bisa mampir sate kambing muda ‘Cempe Lemu’. Mudah. Praktis. Tidak jauh dari mulut *exit* tol.

Setiap kali mampir Cempe Lemu selalu saya lihat kemajuannya. Awalnya dulu hanya kecil, tidak ber-AC. Lalu buka yang baru: tidak sampai 100 meter

di timurnya. Bangunannya bagus. Pakai AC. Dua lantai.

Mampir lagi kemarin, yang baru itu sudah punya lahan pakir luas. Kelihatannya Cempe Lemu baru saja membeli tanah pakir itu. “Cabangnya yang di tengah kota Tegal lebih mewah lagi,” ujar Mas Syukron, pimpinan Radar Tegal yang menemani saya makan sate, sop, dan krengsengan serba kambing.

Cempe Lemu adalah kisah sukses Tegal.

Usai makan, kami harus memutuskan: di mana tambah listrik. Sisa listrik Denza tinggal 31 persen. Kang Sahidin mau aman: isi di rest area Pemalang. Tinggal 30 km lagi. Kang Sahidin tahu persis ada stasiun pengisian listrik yang 100 kW --*fast charging* di Pemalang.

Saya pilih isi di *rest area* yang lebih jauh: Pekalongan. Masih 62 km dari

Cempe Lemu. Sekalian ujicoba apakah dengan 31 persen masih bisa mencapai Pekalongan.

Tiba di *rest area* Pekalongan tinggal 19 persen. *Ups...* SPKLU PLN di situ tidak jalan. Masuk aplikasinya gagal terus. Lalu datang mobil Wuling yang juga ingin *charging*. Juga frustrasi. Gagal.

Padahal listrik Denza tinggal 19 persen. *Ups...* Internet menyebulatkan ada SPKLU lagi tidak jauh di timurnya. Hanya berjarak 5 km.

Benar. Tidak ada *rest area* tapi ada *charging station*. Dari jauh terlihat ada mobil ION yang sedang *charging*. Berarti kami pun tidak akan gagal.

Awalnya agak sulit masuk aplikasinya. Saya ketok kaca ION itu. Yang keluar seorang wanita muda, modis, pakai *short*, sendirian. Saya minta diajari masuk aplikasinya. Berhasil.

Tentu saya bertanya dari mana dan akan ke mana. Dijawab: dari Merbabu akan pulang ke Pekalongan. Ternyata dia baru pulang dari lari 50 km di kaki gunung Merbabu. Sudah sering ikut lari melebihi jarak marathon seperti itu. Dan masih akan lari seperti itu lagi bulan depan.

Ternyata dia seorang dokter gigi. Alumnus UGM. Asal Yogya. Ambil spesialisnya pun di UGM. Kini tugasnyi di RSU Pekalongan.

Saya ucapkan terima kasih pada dokter gigi modis itu.

Kami meneruskan perjalanan. Berarti harus *charging* sekali lagi. Kami pilih akan isi listrik di *rest area* Sragen. Sekalian ke toilet.

Ternyata di SPKLU Sragen muncul kesulitan lagi. Setiap kali masuk aplikasi selalu terbaca “tunggu antrean”. Diulangi

Sambungan dari halaman 1

beberapa kali terus saja dijawab “tunggu antrean”. Semua statium di situ dicoba. Jawabannya sama: tunggu antrean.

Gak masalah: listrik masih 50 persen. Masih bisa sampai Saradan.

Benar. Sampai Saradan masih 27 persen. Masuklah kami ke *rest area*-nya: sudah ada tiga mobil listrik yang sedang *charging*. Masih ada dua yang kosong. Keduanya juga *fast charging*.

Yang kami pilih ternyata punya problem yang sama: setiap kali masuk aplikasi dijawab: “tunggu antrean”. Lalu pindah sebelahnya: berhasil.

Dengan sisa 27 persen sebenarnya saya ingin berspekulasi: toh sudah sampai Saradan. Cukup *nggak* sampai Surabaya.

Kang Sahidin lebih hati-hati: lebih baik sedia payung sebelum ada debu vulkanik. (*)

KOMISARIS UTAMA: Prof Dr H Mangestuti Agil MS Apt KOMISARIS: Drs Mohammad Yamin DIREKTUR UTAMA: Choirul Shodiq SH MH DIREKTUR: Ahmad Syaiku SH MH PENASIHAT HUKUM: Wenas Kusumoharjo ST SH Mohammad Asikin SH	MEMORANDUM BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR	PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB: Sujatmiko S.Sos. KOORDINATOR LIPUTAN: Muchlis Darmawan S.Sos. REDAKTUR: Rakhmat Hidayat S.Sos, Ferry Ardi Setiawan ST, Novi Triawan S.Sos, Hendradi Prayogo, Faishal Danny Nurdiansyah. STAF REDAKSI SURABAYA: Oskario Udayana SH, Muhammad Alfin Alfansyah, Ali Muchtar, Wendy Setiawan S.IKom, Lailatul Nur Aini. REDAKTUR EKSEKUTIF & BUSINESS DEVELOPMENT: Dr Anis Tiana Pottag, S.H., M.H., M.Kn., M.M. PENASIHAT KEMITRAAN: Budi Laopan. SEKRETARIS REDAKSI: Galuh Ajeng Setya Ningrum. SIDOARJO: Budi Joko Santoso SpD SH. TUBAN-BOJONEGORO: Sutopo. MOJOKERTO: Muhammad Anwar. JEMBER: Edi Winarko. TULUNGAGUNG: Ahmad Rifai. MALANG: M Ariful Huda MPd. PASURUAN: Muhammad Hidayat. LUMAJANG: Agus Sucipto. MADURA: Ainul Anwar. BLITAR: Abdul Azis. MANAJER UMUM DAN HRD: Ahmad Nurzaman. MANAJER IKLAN: Ahmad Syaiku SH MH. KEPALA PRA CETAK: Irfan H. Ali. PERWAJAHAN: Subakir, Ihyak Ulumudin, Andi Ego, Risa Yudianta. IT: Drs. Soeprayitno. KOORDINATOR PEMASARAN: Suhadak. ALAMAT PERUSAHAAN: Jl. Ketintang Baru III No.91, Surabaya. FAX MUTASI/PEMASARAN: 0838-3251-4647. TELP HOTLINE: 0812-3252-205. REDAKSI: 0821-3903-0888. IKLAN: 0812-3013-380. SIRKULASI: 0889-9687-0420. HARGA LANGGANAN: Rp. 120.000,-/bulan ++. HARGA ECERAN: Rp. 6.000,-/eks. HARGA IKLAN PAS: Rp. 25.000,-/baris, HARGA IKLAN SOSIAL: Rp. 20.000,-/mm kolom. IKLAN HITAM PUTH: Rp.30.000/mm kolom. SPOT WARNALAH 1: Rp.40.000/mm kolom. SPOT WARNALAH 2: Rp.39.000,-/mm kolom. KREATIF SPOT WARNALAH: Rp.37.000,-/mm kolom. KREATIF COLOUR/ADVERTORIAL: Rp.35.000,-/mm kolom. HARGA IKLAN KREATIF/ADVERTORIAL: Rp.25.000,-/mm kolom. DICETAK KOLEH: PT. Temprina Media Grafika, Jl. Sumengko KM 30-31 Wringinanom, Gresik. DIDIRIKAN OLEH: H. Agil H. Ali, PENERBIT: PT. Memorandum Sejahtera, SUAPP: No. 098/SK/Menpen SUAPP/A6/1986. PT MEMORANDUM MULTIMEDIA SEJAHTERA, MEMORANDUM.DISWAY.ID, KOMISARIS UTAMA: Prof Dr H Mangestuti Agil MS Apt. KOMISARIS: Drs Mohammad Yamin. DIREKTUR: Ahmad Syaiku SH MH. PEMIMPIN REDAKSI MULTIMEDIA: Sujatmiko S.Sos. REDAKTUR EKSEKUTIF & BUSINESS DEVELOPMENT: Dr Anis Tiana Pottag, S.H., M.H., M.Kn., M.M. REDAKTUR: Rakhmat Hidayat S.Sos, Ferry Ardi Setiawan ST, Novi Triawan S.Sos, Hendradi Prayogo, Faishal Danny Nurdiansyah. KOORDINATOR MEDIA SOCIAL & EDITOR VIDEO: Devina Andita Putri. SDM & KEUANGAN: Dian Maulidha. KOORDINATOR EVENT : Ali Muchtar. Wartawan MEMORANDUM selalu dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari narasumber.
---	---	--



SELASA PON, 8 SEPTEMBER 2026

KABIRO: Ainul Anwar. **Bangkalan:** Sjamsul Arief. **Sampang:** Ainul Anwar. **Pamekasan:** Sujak Lukman. **Sumenep:** Syamsuri. **HP:** 087820028104



Bupati Sumenep Achmad Fauzi

Pemkab Sumenep Siapkan Lahan 10 Hektare untuk Pembangunan Sport Center

Sumenep, Memorandum

Pemkab Sumenep kembali membuka komunikasi dengan pemerintah pusat terkait rencana pembangunan sport center.

Fasilitas olahraga terpadu tersebut diharapkan dapat memperkuat sarana olahraga sekaligus mendukung pembinaan atlet di Kabupaten Sumenep.

Upaya itu harus dilakukan secara humanis, sabar, telaten, serta penuh kasih sayang. Begitu pesan yang diamanatkan Bapak Kapolres AKBP Wibowo,” jelas Kasihumas Polres Bangkalan Ipda Agung Intama, Sabtu (5/9).

Program tersebut bertujuan menanamkan pemahaman sejak dini kepada anak-anak mengenai peran, fungsi, serta tugas dan tanggung jawab polisi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

“Sport center akan kita jajaki kembali. Mudah-mudahan nanti ada respons dari pemerintah pusat, karena sport center memang harus ada,” kata Fauzi, Senin (7/9).

Untuk menunjang rencana tersebut, Pemkab Sumenep telah menyiapkan lahan sekitar 10 hektare. Lokasi itu berada di kawasan belakang gedung DPRD Sumenep

dan dinilai lebih memadai dibandingkan lahan yang sebelumnya direncanakan.

Menurut Fauzi, lahan yang sebelumnya diproyeksikan sebagai lokasi sport center kini diarahkan untuk kebutuhan Sekolah Rakyat (SR).

Pemkab kemudian menyiapkan lahan baru dengan luasan yang lebih besar agar pembangunan berbagai fasilitas olahraga dapat dilakukan secara terpadu.

“Untuk mempersiapkan sport center ini ada lahan 10 hektare di

belakang DPRD, masuk sebelum DPRD. Karena lahan yang sebelumnya kurang besar, makanya yang 10 hektare itu yang akan kita pakai untuk sport center,” ujarnya.

Pemkab Sumenep berharap pembangunan sport center dapat segera memperoleh dukungan pemerintah pusat. Keberadaan fasilitas tersebut nantinya diharapkan menjadi pusat kegiatan olahraga sekaligus wadah untuk meningkatkan pembinaan dan prestasi atlet di daerah. (adv/uri/nov)

Polres Bangkalan Kenalkan Polisi sejak Dini

PIJP Salurkan Air untuk Warga Terdampak Kekeringan

Pamekasan, Memorandum

Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pamekasan mendapat perhatian Paguyuban Insan Jurnalis Pamekasan (PIJP).

Sebagai bentuk kepedulian, para jurnalis akan menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak.

Aksi sosial bertajuk “Peduli Krisis Air Bersih” tersebut dijadwalkan berlangsung Rabu mendatang (9/9). Bantuan akan menyasar sejumlah desa yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama musim kemarau.

Ketua PIJP Pamekasan Sujak Lukman mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian insan pers terhadap masyarakat yang sedang menghadapi krisis air bersih.

Menurut Sujak, insan pers tidak hanya memiliki tanggung jawab mengawasi dan menyampaikan informasi kepada publik, tetapi juga dapat hadir secara langsung ketika masyarakat membutuhkan bantuan.

“Atas nama Paguyuban Insan Jurnalis Pamekasan, kami menginisiasi kegiatan ‘Peduli Krisis Air Bersih’ di berbagai kecamatan, antara lain Kecamatan Pademawu dan Tlanakan dan lainnya,” ujar Sujak.

Dalam kegiatan tersebut, PIJP tidak bergerak sendiri. Penyaluran bantuan dilakukan bersama relawan serta sejumlah pihak yang memberikan

dukungan, di antaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan, Polres Pamekasan, Kodim 0826/Pamekasan, dan Perumdam Tirta Jaya.

“Ini adalah bentuk kepedulian kami sebagai insan pers, tidak hanya mengawasi dan memberitakan, tetapi juga hadir langsung membantu masyarakat yang terdampak krisis air bersih,” katanya.

Sebelum bantuan disalurkan, tim PIJP bersama relawan dan mitra telah melakukan survei untuk menentukan lokasi yang paling membutuhkan. Koordinasi dengan perangkat desa juga dilakukan agar pendistribusian air berjalan tepat sasaran.

“Tim PIJP bersama relawan dan mitra terkait telah melakukan survei lokasi serta berkoordinasi dengan perangkat desa. Armada dan tangki air juga sudah dipersiapkan untuk segera didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Sujak berharap bantuan air bersih tersebut dapat meringankan beban warga yang selama musim kemarau harus menghadapi keterbatasan pasokan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Kami berharap bantuan ini bisa meringankan beban masyarakat di tengah musim kemarau panjang. Ini adalah wujud nyata kepedulian PIJP untuk Pamekasan,” katanya.

Ia juga mengapresiasi



Persiapan kegiatan sosial pendistribusian bantuan air bersih bagi warga di wilayah Pamekasan.

dukungan sejumlah instansi yang terlibat dalam aksi kemanusiaan tersebut. Menurut dia, kolaborasi menjadi bagian penting dalam membantu masyarakat menghadapi krisis air bersih.

“Alhamdulillah, kegiatan ini bisa terlaksana berkat sinergi dan dukungan dari para donatur kami: BPBD Pamekasan, Polres Pamekasan, Kodim 0826, dan Perumdam Tirta Jaya (PDAM). Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya,” ungkapnya.

PIJP berharap gerakan tersebut tidak berhenti pada penyaluran bantuan air bersih. Persoalan kekeringan dinilai membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, lembaga, hingga sektor swasta agar penanganannya dapat dilakukan secara berkelanjutan.

“Harapan kami, kegiatan ini tidak berhenti di sini. Kami ingin menggugah kepedulian semua pihak bahwa krisis air bersih adalah tanggung jawab kita bersama,” tandas Sujak. (sjk/nov)

Bangkalan, Memorandum

Polres Bangkalan terus mengembangkan berbagai kiat untuk menyukseskan program Polisi Sahabat Anak di kalangan siswa usia PAUD, TK, SD, maupun sekolah lain yang sederajat.

Program tersebut bertujuan menanamkan pemahaman sejak dini kepada anak-anak mengenai peran, fungsi, serta tugas dan tanggung jawab polisi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

“Upaya itu harus dilakukan secara humanis, sabar, telaten, serta penuh kasih sayang. Begitu pesan yang diamanatkan Bapak Kapolres AKBP Wibowo,” jelas Kasihumas Polres Bangkalan Ipda Agung Intama, Sabtu (5/9).

Menurut Agung, pendekatan humanis diharapkan mampu menginspirasi anak-anak bahwa polisi merupakan sosok yang galak, bengis, seram, dan menakutkan di mata anak-anak.

Sebaliknya, sejak usia

dini mereka diharapkan mulai memahami tugas anggota Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Termasuk peran kepolisian dalam menjaga pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) di garda terdepan.

“Nah, sosialisasi program Polisi Sahabat Anak ini harus diterapkan oleh personel di semua satuan fungsi (satfung) Polres dan Polsek jajaran,” imbuh Agung.

Amanah tersebut salah satunya ditindaklanjuti personel Satsamapta Polres Bangkalan. Jumat siang (4/9), selepas mengikuti pelajaran olahraga, belasan siswa SDN Kramat 2 terlihat sedang berekreasi di kawa-



Personel Satsamapta Polres Bangkalan saat asyik bercengkerama sambil mengedukasi siswa SD di pesisir pantai.

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN			
Berdasarkan pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Th. 1996, PT. Bank Central Asia, Tbk akan melakukan pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, melalui jasa pra lelang PT. Balai Lelang Tunjungan terhadap :			
1. Debitur Rofiq, dengan objek lelang sebagai berikut : Sebidang tanah seluas 411 m2, berikut bangunan, SHM No. 03347, a.n. Siti Nurhasanah, terletak di Desa Cakru, Kec. Kencong, Kab. Jember, Provinsi Jawa Timur. Alamat : Jalan Lingkungun Dusun Legong RT 02 RW 06, Desa Cakru, Kec. Kencong, Kab. Jember, Provinsi Jawa Timur. Harga Limit : Rp. 167.406.200,- Uang Jaminan : Rp. 80.000.000,-			
2. Debitur Siti Syarifah Sejahtera, dengan objek lelang sebagai berikut : Sebidang tanah seluas 72 m2, berikut bangunan, SHGB No. 44, a.n. 1. Abdul Asli, 2. Siti Syarifah Sejahtera, terletak di Desa Pringgowirawan, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember, Provinsi Jawa Timur. Alamat : Perumahan Griya Pringgowirawan Blok S No. 02, Desa Pringgowirawan, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember, Provinsi Jawa Timur. Harga Limit : Rp. 182.400.000,- Uang Jaminan : Rp. 72.960.000,-			
3. Debitur Agung Hariyadi, dengan objek lelang sebagai berikut : Sebidang tanah seluas 815 m2, berikut bangunan, SHM No. 1776, a.n. Susan Santika, terletak di Desa Candipuro, Kec. Candipuro, Kab. Probolinggo, Propinsi Jawa Timur. Alamat : Jalan Dusun Kralan RT. 002 RW. 003, Desa Candipuro, Kec. Candipuro, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Harga Limit : Rp. 266.103.420,- Uang Jaminan : Rp. 125.000.000,-			
4. Debitur Ali Farisi, dengan objek lelang sebagai berikut : Sebidang tanah seluas 583 m2, berikut bangunan, SHM No. 341, a.n. Ali Farisi, terletak di Desa Pikatan, Kec. Gending, Kab. Probolinggo, Propinsi Jawa Timur. Alamat : Jalan Desa Pikatan RT. 09 RW. 04, Desa Pikatan, Kec. Gending, Kab. Probolinggo, Propinsi Jawa Timur. Harga Limit : Rp. 316.000.000,- Uang Jaminan : Rp. 94.800.000,-			
KETERANGAN : 1. Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening VA (virtual account) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan. 2. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Jember selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. 3. Apabila peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang tidak melunasi dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan disetorkan ke kas negara. 4. Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah dari suatu bangunan mengacu pada UU No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada. 5. Objek lelang dijual dalam kondisi apa adanya. Peserta lelang dianggap telah mengetahui kondisi objek lelang sehingga apabila ada suatu hal terjadi gugatan, pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap objek lelang tersebut di atas, pihak-pihak yang berkepentingan/pemint lelang tidak diperkenankan melakukan tuntutan kepada KPKNL Jember, PT. Bank Central Asia, Tbk & PT. Balai Lelang Tunjungan.			
PELAKSANAAN LELANG : Cara penawaran : Open Bidding (Alamat Domain lelang.go.id) Hari/Tanggal : Selasa / 22 September 2026 Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran Batas Akhir Penawaran : 22 September 2026, Pukul 10:45 WIB (sesuai waktu server) Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran Pelunasan harga lelang : Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang Bea Lelang Pembeli : 2 % dari harga lelang Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Malang, Jalan Erlangga No. 161 Sidoarjo Surabaya, 08 September 2026 PT. Balai Lelang Tunjungan PT. Bank Central Asia, Tbk KPKNL Sidoarjo INFO HUBUNGI : 081.7500.4000 / 0821.42.402.407 / web : lelangtunjungan.id / IG : @balangan_sby			

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN			
Berdasarkan pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Th. 1996, PT. Bank Central Asia, Tbk akan melakukan pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan sesuai Salinan Buku Tanah Hak Tanggungan yang dikeluarkan Kantor Pertanahan, melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang, menggunakan jasa pra lelang PT. Balai Lelang Tunjungan terhadap debitur Sri Lalmira, sebagai berikut : Sebidang tanah seluas 102 m2, berikut bangunan, SHM No. 524, a.n. Ahmad Syahada, terletak di Desa Randuagung, Kec. Singosari, Kab. Malang, Propinsi Jawa Timur. Alamat : Perumahan Randuagung Indah, Jalan Rajawali II Blok H No. 5, Desa Randuagung, Kec. Singosari, Kab. Malang, Propinsi Jawa Timur. Harga Limit : Rp. 433.450.000,- Uang Jaminan : Rp. 200.000.000,-			
KETERANGAN : 1. Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening VA (virtual account) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan. 2. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Malang selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang. 3. Apabila peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang tidak melunasi dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan disetorkan ke kas negara. 4. Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah dari suatu bangunan mengacu pada UU No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada. 5. Objek lelang dijual dalam kondisi apa adanya. Peserta lelang dianggap telah mengetahui kondisi objek lelang sehingga apabila ada suatu hal terjadi gugatan, pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap objek lelang tersebut di atas, pihak-pihak yang berkepentingan/pemint lelang tidak diperkenankan melakukan tuntutan kepada KPKNL Malang, PT. Bank Central Asia, Tbk & PT. Balai Lelang Tunjungan.			
PELAKSANAAN LELANG : Cara penawaran : Open Bidding (Alamat Domain lelang.go.id) Hari/Tanggal : Selasa / 22 September 2026 Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran Batas Akhir Penawaran : 22 September 2026, Pukul 10:30 WIB (sesuai waktu server) Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran Pelunasan harga lelang : Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang Bea Lelang Pembeli : 2 % dari harga lelang Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Malang, Jalan S. Supriyadi Nomor 157 Malang Malang, 08 September 2026 PT. Balai Lelang Tunjungan PT. Bank Central Asia, Tbk KPKNL Malang INFO HUBUNGI : 081.7500.4000 / 0821.42.402.407 / web : lelangtunjungan.id / IG : @balangan_sby			

PENGUMUMAN LELANG ULANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN			
SECARA E-AUCTION (OPEN BIDDING)			
Menunjuk pengumuman Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan yang terbit pada tanggal 30 Juli 2026 melalui surat kabar Memorandum (Pelaksanaan lelang tgl 13 Agustus 2026) Debitur An. Bayu Setyo Nugroho SH, berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No.4 tahun 1996, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Lamongan akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Secara E-Auction (Open Bidding), dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang, terhadap barang jaminan debitur			
No.	Nama Debitur	Objek Lelang	Nilai Limit
1.	Bayu Setyo Nugroho SH	Barang tidak bergerak berupa sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu datangnya, sesuai SHM Nomor 3313, luas tanah 591 m ² atas nama Bayu Setyo Nugroho SH, terletak di Desa/Kelurahan Sumberrejo Kec. Dander Kab. Bojonegoro	600.000.000
2.	Bayu Setyo Nugroho SH	Barang tidak bergerak berupa sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu datangnya, sesuai SHM Nomor 1448, luas tanah 203 m ² atas nama Bayu Setyo Nugroho SH, terletak di Desa/Kelurahan Sumberrejo Kec. Dander Kab. Bojonegoro	220.000.000
3.	Bayu Setyo Nugroho SH	Barang tidak bergerak berupa sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu datangnya, sesuai SHM Nomor 891, luas tanah 419 m ² atas nama Bayu Setyo Nugroho SH, terletak di Desa/Kelurahan Sumberrejo Kec. Dander Kab. Bojonegoro	183.000.000
4.	Bayu Setyo Nugroho SH	Barang tidak bergerak berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu datangnya, sesuai SHM Nomor 315, luas tanah 449 m ² atas nama Bayu Setyo Nugroho SH, terletak di Desa/Kelurahan Dander Kec. Dander Kab. Bojonegoro	140.000.000
PELAKSANAAN LELANG : 1. Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan. 2. Uang jaminan harus sudah diterima oleh KPKNL Malang paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. 3. Apabila biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 4. Peserta lelang yang telah terverifikasi pada website lelang.go.id 5. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 6. Objek lelang dijual dalam kondisi apa adanya. Peserta lelang dianggap telah mengetahui kondisi objek lelang. 7. Apabila karena suatu hal terjadi gugatan, dan pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap salah satu atau beberapa objek lelang tersebut di atas, pihak-pihak yang berkepentingan/pemint lelang tidak diperkenankan melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Malang, PT. Bank Central Asia, Tbk & PT. Balai Lelang Tunjungan.			
PELAKSANAAN LELANG : Cara penawaran : Open Bidding (Alamat Domain lelang.go.id) Hari/Tanggal : Selasa / 22 September 2026 Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran Batas Akhir Penawaran : 22 September 2026, Pukul 11:00 WIB (sesuai waktu server) Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran Pelunasan harga lelang : Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang Bea Lelang Pembeli : 2 % dari harga lelang Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Malang, Jalan S. Supriyadi Nomor 157 Malang Malang, 08 September 2026 PT. Balai Lelang Tunjungan PT. Bank Central Asia, Tbk KPKNL Malang INFO HUBUNGI : 081.7500.4000 / 0821.42.402.407 / web : lelangtunjungan.id / IG : @balangan_sby			



SELASA PON, 8 SEPTEMBER 2026

KEPALA BIRO: M. Ariful Huda. WARTAWAN: Edi Riawan, Mistiani, Ahmad Tauhid. PEMASARAN: Arif Suherman. TELP: 081334176539.

- memorandumredaksi@gmail.com
- memorandum.disway.id
- MemorandumTV & Memorandum Online
- memorandum
- memorandumonline & memorandumredaksi
- memorandum

Perangkat Daerah Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Malang, Memorandum

Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam memperkuat kualitas pelayanan publik dan membangun birokrasi yang berintegritas kembali mendapat apresiasi.

Kali ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang berhasil memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Wali Kota Malang Dr Ir Wahyu Hidayat MM berkesempatan menyerahkan piagam penghargaan WBBM tersebut kepada Kepala Dispendukcapil Kota Malang, Ir Dahliana Lusi Ratnasari MM.

Menurutnya, predikat WBBM menjadi bukti bahwa upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan yang berorientasi kepada masyarakat terus berjalan di lingkungan Pemkot Malang.

“Predikat WBBM ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi di Kota Malang terus berjalan dan memberikan hasil nyata. Pelayanan publik harus semakin mudah, cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ucapnya saat menyampaikan amanat pada rangkaian Apel ASN Pemkot Malang, bertempat di halaman Balai Kota Malang, Senin (7/9).

Atas capaian tersebut, Wali Kota



Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyerahkan piagam penghargaan WBBM kepada Kepala Dispendukcapil Kota Malang Dahliana Lusi Ratnasari.

Wahyu mengapresiasi hasil kerja dan komitmen seluruh jajaran Dispendukcapil dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran Dispendukcapil Kota Malang atas dedikasi dan kerja kerasnya. Penghargaan ini harus menjadi penyemangat untuk terus mempertahankan dan meningkatkan standar pelayanan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Wali Kota Wahyu menjelaskan capaian WBBM tidak boleh dimaknai sebagai akhir dari proses pembenahan pelayanan. Sebaliknya, predikat tersebut harus menjadi motivasi untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan yang telah dibangun.

Untuk itu diharapkan Dispendukcapil terus melakukan evaluasi dan inovasi agar standar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat semakin baik.

Wali Kota Wahyu berharap capaian Dispendukcapil dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi perangkat daerah lainnya di lingkungan Pemkot Malang. Keberhasilan membangun zona pelayanan yang bersih dan berorientasi pada masyarakat harus dapat direplikasi sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing perangkat daerah.

“Semangat dan komitmen Dispendukcapil ini patut menjadi inspirasi bagi seluruh perangkat

daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Karena capaian ini bukan hanya prestasi satu perangkat daerah, tetapi menjadi dorongan bagi kita semua untuk terus berbenah dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ucap Wali Kota Wahyu.

Wahyu juga menekankan bahwa penghargaan tersebut pada akhirnya harus bermuara pada manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, ia mendorong seluruh ja-

garan Pemerintah Kota Malang untuk terus membangun budaya kerja yang berintegritas, meningkatkan profesionalitas aparatur, serta menghadirkan pelayanan publik yang mudah, cepat, transparan, dan responsif.

“Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan birokrasi bukan hanya seberapa banyak penghargaan yang kita raih, tetapi seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat,” terang Wali Kota Wahyu Hidayat. (pkp/ari/lis)

Gubernur Khofifah Silaturahmi di Blitar
Asep Kusdinar: Pemerintah Hadir dan Mendengar

Blitar, Memorandum

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersilaturahmi bersama keluarga besar Majelis Ta'lim Sabilu Taubah di Kabupaten Blitar, Sabtu (5/9) malam. Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil) III Malang, Asep Kusdinar turut mendampingi.

Bagi Asep, pertemuan Gubernur Khofifah dengan masyarakat menjadi lebih dari sekadar agenda silaturahmi. Kehadiran langsung pemimpin daerah di tengah masyarakat dinilai penting untuk membangun komunikasi sekaligus mendengar aspirasi dan dinamika yang berkembang di lapangan.

“Pemerintahan tidak cukup hanya hadir melalui kebijakan dan program. Pemerintah juga harus hadir secara langsung, membangun komunikasi dan mendengarkan masyarakat,” ujar Asep.

Menurut Asep, ruang pertemuan seperti yang berlangsung di Majelis Ta'lim Sabilu Taubah dapat menjadi jembatan untuk memperkuat kedekatan antara pemerintah dan masyarakat. Komunikasi yang terbangun secara langsung memungkinkan pemerintah memahami kebutuhan masyarakat dari perspektif yang lebih dekat.

“Silaturahmi membuka ruang komunikasi yang lebih cair. Ada kedekatan, ada kebersamaan dan yang paling penting ada kesempatan untuk saling mendengarkan,” katanya.

Asep mengatakan, kepercayaan

publik tidak hanya dibangun melalui kebijakan yang tepat, tetapi juga melalui kehadiran dan komunikasi pemerintah bersama masyarakat.

Setiap wilayah, menurutnya memiliki karakteristik dan persoalan yang berbeda. Karena itu, interaksi langsung dengan masyarakat menjadi penting agar pemerintah tidak hanya melihat persoalan dari balik meja, tetapi memahami kondisi yang benar-benar dihadapi masyarakat.

“Ketika pemerintah hadir dan mau mendengarkan, masyarakat juga memiliki ruang untuk menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan dan harapannya. Dari komunikasi seperti inilah kepercayaan dapat tumbuh,” jelasnya.

Dalam konteks kewilayahan, Bakorwil Malang terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta berbagai unsur dan stakeholder di wilayah kerja.

Kehadiran Asep dalam mendampingi Gubernur Khofifah juga menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan berbagai elemen masyarakat.

Lebih jauh, Asep menilai komunikasi yang baik menjadi fondasi untuk membangun kolaborasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan di daerah.

Ia menegaskan, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Pembangunan membutuhkan keterlibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, komunitas, dunia usaha, pemerintah daerah hingga masyarakat di tingkat akar



Silaturahmi Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa didampingi Kepala Bakorwil Malang Asep Kusdinar bersama keluarga besar Majelis Ta'lim Sabilu Taubah.

rumput.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Semangat kebersamaan harus terus kita rawat. Pemerintah, masyarakat dan seluruh stakeholder harus berjalan bersama, karena pembangunan pada akhirnya adalah kerja bersama,” tutur Asep.

Asep menyebutkan silaturahmi menjadi salah satu cara untuk membangun modal sosial sebelum masuk pada kerja-kerja kolaboratif yang lebih konkret.

“Kalau komunikasi sudah terbangun, kolaborasi akan lebih mudah dilakukan. Dari kolaborasi itulah kita bisa mencari solusi bersama atas

berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat,” tuturnya.

Semangat tersebut sejalan dengan DNA Baru Bakorwil Malang: Kolaborasi, Gotong Royong, Solusi. “Kolaborasi bukan hanya konsep, tetapi harus menjadi cara kita bekerja. Gotong royong bukan hanya nilai, tetapi harus menjadi energi pembangunan. Dan setiap koordinasi harus bermuara pada solusi,” tegas Asep.

Silaturahmi Gubernur Khofifah bersama keluarga besar Majelis Ta'lim Sabilu Taubah menjadi bagian dari rangkaian kehadiran Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Blitar. Sebelumnya, pemerintah juga

menghadirkan sejumlah intervensi untuk menjawab kebutuhan masyarakat, antara lain melalui penanganan kekeringan dan penyaluran bantuan air bersih serta Pasar Murah untuk membantu menjaga daya beli masyarakat.

Bagi Asep, berbagai bentuk kehadiran tersebut menunjukkan bahwa pelayanan pemerintah tidak berhenti pada pelaksanaan program. Kehadiran pemerintah juga perlu dirasakan melalui komunikasi dan kedekatan dengan masyarakat.

“Pembangunan bukan hanya tentang program, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah hadir, mem-

bangun hubungan dan memastikan masyarakat merasa menjadi bagian dari proses pembangunan,” ujarnya.

Asep menambahkan, masyarakat bukan hanya penerima manfaat pembangunan, tetapi juga bagian penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan di daerah. Karena itu, ia mendorong agar komunikasi antara pemerintah dan masyarakat terus dibangun melalui berbagai ruang pertemuan.

“Ketika pemerintah hadir, mendengar dan kemudian bergerak bersama masyarakat, di situlah pembangunan menjadi lebih kuat dan lebih bermakna,” katanya. (bkw/ari/lis)

PENGUMUMAN LELANG ULANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN SECARA E-AUCTION (OPEN BIDDING)				
Menunjuk pengumuman Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan yang terbit pada tanggal 06 Agustus 2026 melalui surat kabar Memorandum (Pelaksanaan lelang terdapat di 15 Agustus 2026) Debitur An, Achmed Syafuddin, berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No.4 tahun 1996, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Lamongan akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Secara E-Auction (Open Bidding), dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang, terhadap barang jaminan debitur.				
No.	Nama Debitur	Objek Lelang	Nilai Limit	Uang Jaminan
1.	Achmad Syafuddin	Barang tidak bergerak berupa sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu diatasnya, sesuai SHM Nomor 2232, luas tanah 425 m ² atas nama ACHMAD SYAFUDDIN, terletak di Desa/Kelurahan Gunungrejo Kec. Buaru Kab. Bojonegoro	800.000.000	240.000.000
2.	Achmad Syafuddin	Barang tidak bergerak berupa sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu diatasnya, sesuai SHM Nomor 185, luas tanah 282 m ² atas nama ACHMAD SYAFUDDIN, terletak di Desa/Kelurahan Gunungrejo Kec. Buaru Kab. Bojonegoro	700.000.000	210.000.000
PELAKSANAAN LELANG :				
Cara Penawaran : Open Bidding (dengan mengakses https://lelang.go.id)				
Hari / Tanggal : Selasa, 15 September 2026				
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran				
Batas Akhir Waktu Penawaran : 15 September 2026, Pukul 11.00 WIB (Sesuai Waktu Server)				
Alamat Domain : lelang.go.id				
Tempat Lelang : KPKNL Malang, Jl. Selayu Timur No. 141 Madiun				
Penetapan Pemegang : Setelah batas akhir penawaran				
Penentuan Harga Lelang : 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang				
Bisa Lelang Pembeli : 2% dari harga lelang				
Lamongan, 08 September 2026				
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Lamongan				

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN				
Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sumenep, akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pamekasan terhadap barang jaminan :				
No	Nama Debitur	Objek Lelang	Nilai Limit (Rp)	Jaminan Penawaran Lelang (Rp)
1.	RE.KHAIRUL ANWAR	Sebidang Tanah dan Bangunan yang berdi atasnya SHM No.698 luas tanah 56m ² , Desa Pengangen, Kec. Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep atas nama : Siti Maryam	150.000.000	30.000.000
Selasa, 22 September 2026, Pukul 10.00 WIB (sesuai waktu server)				
Keterangan :				
1. Nominal jaminan penawaran lelang yang disetor ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan.				
2. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Pamekasan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang (23.59 WIB).				
3. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme penawaran menjadi beban peserta lelang.				
4. Peserta lelang diwajibkan melihat, mengetahui dan menyitujui aspek legal dari objek yang dielang dengan kondisi apa adanya (as is), Contact Person : Rully Agusta (087 750 995 768)				
5. Apabila terjadi pembatalan lelang sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, maka pihak-pihak yang berkepentingan tidak dapat menggugat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sumenep dan KPKNL Pamekasan.				
Pendaftaran Lelang :				
1. Peserta harus memiliki akun yang telah terverifikasi pada website https://www.lelang.go.id				
2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website di atas.				
Pelaksanaan Lelang :				
Cara Penawaran : Open Bidding				
Dengan mengakses https://www.lelang.go.id				
Hari / Tanggal : Selasa, 22 September 2026				
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. Batas Akhir Penawaran				
Pelaksanaan Harga Lelang : Pukul 10.00 WIB (sesuai waktu server)				
Penetapan Pemegang : Setelah Batas Akhir Penawaran				
Bisa Lelang Pembeli : 2% (dua persen) dari harga lelang				
Penggunaan BPHTB : Sesuai UU No.1 Tahun 2022				
Tempat Pelaksanaan : 1.1% (satu komi satu persen) dari harga terbentuk lelang				
Tempat Pelaksanaan : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, kantor cabang Sumenep BRI unit Pragaan, Jl Raya prandangan, Pragaan, Sumenep.				
Sumenep, 08 September 2026				
KPKNL PAMEKASAN				

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN				
Menunjuk Pengumuman pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada selebaran tanggal 24 Agustus 2026, PT. Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk, dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya, akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, terhadap barang jaminan debitur atas nama ROBY SENJAYA berupa:				
Barang tidak bergerak berupa sebidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Karet No.65 C, Kel.Bongkaran, Kec. Pabean Cantian (pada sertifikat terdapat Kecamatan Pabean Cantian), Kota Surabaya sebagaimana tercantum dalam SHGB No.1564 Kel.Bongkaran dengan luas 42 m ² atas nama ROBY SENJAYA. (Nilai Limit Rp. 507.000.000,- / Jaminan Rp. 101.400.000,-)				
Pelaksanaan Lelang:				
Cara Penawaran: Melalui Aplikasi Lelang Internet (open bidding)				
Hari / Tanggal: Selasa, 22 September 2026				
Waktu Penawaran: Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran				
Batas Akhir Waktu Penawaran: 22 September 2026 pukul 10:05 WIB (sesuai waktu server)				
Alamat Domain: lelang.go.id				
Tempat Lelang: KPKNL Surabaya, Jl. Indrapura No. 5, Surabaya				
Penetapan Pemegang: Setelah batas akhir penawaran				
Penentuan Harga Lelang: 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang				
Bisa Lelang Pembeli: 2% dari harga lelang				
Keterangan :				
1. Nominal Jaminan yang disetor ke bank melalui rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan nominal jaminan yang di syaratkan.				
Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat – lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.				
Pemegang lelang akan dikenakan biaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,1% dari nilai lelang yang terbentuk sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia nomor 41 tahun 2023.				
Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme penawaran menjadi beban peserta lelang.				
Kondisi obyek yang dijual dalam kondisi sesungguhnya sesuai dengan lokasi, semua cacat dan kekurangannya (as is), kami mengajurkan peminat untuk melihat dan memeriksa obyek yang bersangkutan sebelum pelaksanaan lelang				
Bila ada tanggapan PAM, PBB, PLN dan telepon sehubungan dengan obyek yang dimenangkan, seluruhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Lelang				
Pendaftaran Lelang :				
1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website lelang.go.id .				
2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website tersebut di atas.				
3. Peserta lelang diwajibkan melihat, mengetahui kondisi objek lelang sehingga apabila karena suatu hal terjadi pembatalan / penundasan pelaksanaan lelang, maka peserta tidak diperkenankan melakukan tuntutan apapun kepada KPKNL Surabaya dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk.				
Info : 08564537722/085643825688				
Surabaya, 08 September 2026				
KPKNL SURABAYA				

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN	
Berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah, PT Bank Central Asia, Tbk , akan melakukan penjualan dimuka umum/lelang eksekusi Hak Tanggungan melalui perantara jasa pra lelang PT. Balai Lelang Internusa Perwakilkan Surabaya dengan penawaran melalui internet dengan cara " <i>open bidding</i> " tanpa kehadiran peserta lelang terhadap jaminan milik debitur / penjamin hutang atas nama:	
DANIEL TEGUH KURNIAWANTO	
Sebidang tanah beserta bangunan dan segala sesuatu diatasnya, sesuai SHM No. 03875, an. Daniel Teguh Kurniawanto, seluas 88 m ² , terletak di Jl. Mulyosari Baru No.97-A (di sertifikat tertulis Jl. Mulyosari Baru No.43.44.45), Kelurahan Kalikari, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dijual dengan Kondisi Apa Adanya	
Nilai Limit Rp. 1.257.410.000,-	Jaminan Lelang Rp. 251.482.000,-
Waktu Pelaksanaan Lelang:	
Hari / Tanggal	
Waktu Penawaran	
Batas Akhir Waktu Penawaran	
Alamat Domain	
Tempat Lelang	
Penetapan Pemegang	
Peserta lelang diharap menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain diatas.	
Syarat-syarat Lelang:	
1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website lelang.go.id	
2. Syarat ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas.	
3. Nominal jaminan yang disetor ke bank melalui rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan, dan sudah efektif diterima selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.	
4. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme penawaran menjadi beban peserta lelang	
5. Cara Penawaran : Open Bidding (dengan mengakses lelang.go.id)	
6. Penentuan Harga Lelang : 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang	
7. Bisa Lelang Pembeli : 2% (dua persen) dari harga lelang	
8. Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah diatasnya bangunan mengacu pada UU No.1 Th 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Daerah dimana objek lelang berada.	
9. Tempat dan jangka waktu melihat barang pada alamat tersebut diatas, sejak pengumuman ini terbit sampai dengan sebelum pelaksanaan lelang	
10. Obyek lelang dijual dengan ketentuan dan kondisi apa adanya sehingga apabila karena sesuatu hal terjadi gugatan, tuntutan, pembatalan/pemundasan pelaksanaan lelang terhadap obyek lelang tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan terhadap apapun kepada KPKNL Surabaya/Pejabat Lelang, PT Bank Central Asia Tbk dan PT Balai Lelang Internusa.	
11. Informasi : KPKNL Surabaya : (031) 3573953, 3523516, PT Bank Central Asia, Tbk dan PT. Balai Lelang Internusa 0811305599 / 0815954457	
Surabaya, 08 September 2026	
PT. Bank Central Asia, Tbk	
KPKNL Surabaya	

KOTA SURABAYA

3.283 Warga Sanggah Desil, 1.845 Turun Peringkat

Surabaya, Memorandum

Sebanyak 3.283 warga Surabaya mengajukan sanggahan karena menilai peringkat desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak sesuai kondisi sebenarnya.

Dari jumlah itu, 1.845 warga justru mengalami penurunan desil, 345 naik, sedangkan 1.093 lainnya tetap.

Data tersebut tercatat hingga triwulan III 2026. Pemkot Surabaya melalui Dinas Sosial (Dinsos) melakukan verifikasi lapangan sebelum mengusulkan perubahan kepada pemerintah pusat.

Kepala Dinsos Surabaya Antiek Sugiharti mengatakan, hasil akhir pemeringkatan desil bukan kewenangan pemerintah kota. "Dari total 3.283 aduan sanggahan, yang naik desilnya ada 345,

turun 1.845, dan yang tetap 1.093," kata Antiek, Senin (7/9).

Menurut dia, pemkot hanya melakukan verifikasi atau *outreach* berdasarkan kondisi riil warga. Hasil verifikasi kemudian disampaikan sebagai usulan, sementara keputusan akhir tetap dilakukan pemerintah pusat.

"Kenapa kita sudah cek, tapi hasilnya ada yang masih tetap. Kami mengusulkan, menyampaikan, tetapi proses pendesilan menjadi kewenangan di pusat," ujarnya.

Warga yang merasa

kondisi ekonominya tidak sesuai dengan desil dapat mengajukan sanggahan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos dengan menyertakan identitas, alasan keberatan, dan bukti pendukung seperti foto kondisi rumah.

Pembaruan data juga dapat dilakukan melalui Perlinsos Digital, BPS, maupun kelurahan. "Jadi yang pertama bisa melalui Cek Bansos secara mandiri. Yang kedua melalui Perlinsos. Yang ketiga melalui BPS. Dan keempat bisa melalui kelurahan," jelas Antiek.

Pemkot juga meminta RT dan RW aktif melaporkan kondisi warga. Mereka yang tidak mampu tetapi tercatat pada desil 6 hingga 10 dapat diusulkan untuk diverifikasi. Sebaliknya, warga yang

sudah tergolong mampu tetapi masih berada pada desil 1 hingga 5 juga perlu dilaporkan.

Antiek menjelaskan, desil menjadi salah satu dasar penentuan sasaran perlindungan sosial. Kementerian Sosial umumnya menggunakan desil 1 hingga 4 untuk penyaluran bansos, sedangkan desil 1 hingga 5 untuk kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Data yang diterima Dinsos Surabaya mencakup desil 1 sampai 5. Sementara cakupan desil

■ Bersambung ke halaman 10

Uji coba pelaksanaan Perlinsos digital kepada warga.



Pemkot Didorong Rutin Verifikasi



Warga memasukkan data ke dalam aplikasi Perlinsos digital.

RIBUAN sanggahan warga terhadap data desil menunjukkan kondisi sosial ekonomi masyarakat tidak selalu berjalan sesuai angka di atas kertas. Karena itu, pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dinilai tidak cukup dilakukan sekali, tetapi harus menjadi proses yang rutin.

Sebanyak 3.283 pengaduan terkait ketidaksesuaian desil diterima Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya hingga triwulan III 2026. Pemkot kemudian mela-

kukan verifikasi lapangan sebelum mengusulkan perubahan kepada pemerintah pusat.

Wakil Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jawa Timur Isa Ansori menilai mekanisme sanggah dan verifikasi penting untuk memastikan kebijakan perlindungan sosial tepat sasaran.

"Angka memang tidak selalu mampu membaca kehidupan. Tetapi kehidupan juga tidak mungkin dikelola hanya dengan kesan dan persepsi. Karena

itu, yang kita butuhkan adalah data yang mutakhir, akurat dan berkeadilan," kata Isa, Senin (7/9).

Menurut dia, perubahan pekerjaan, pendapatan, jumlah anggota keluarga, tanggungan, tempat tinggal hingga kepemilikan aset dapat mengubah kondisi sosial ekonomi seseorang. Jika data tidak diperbarui, berpotensi terjadi dua kesalahan: warga yang semestinya menerima bantuan justru terlewat, atau warga yang sudah tidak memenuhi kriteria masih

tercatat sebagai penerima.

"Ini yang dalam pengelolaan data disebut *exclusion error* dan *inclusion error*. Keduanya sama-sama persoalan keadilan," ujarnya.

Isa mengapresiasi ruang sanggah yang memungkinkan masyarakat melaporkan ketidaksesuaian data sekaligus menyertakan bukti. Namun, verifikasi menurut dia jangan berhenti setelah seluruh pengaduan selesai ditangani.

"Data sosial tidak boleh diperlakukan seperti

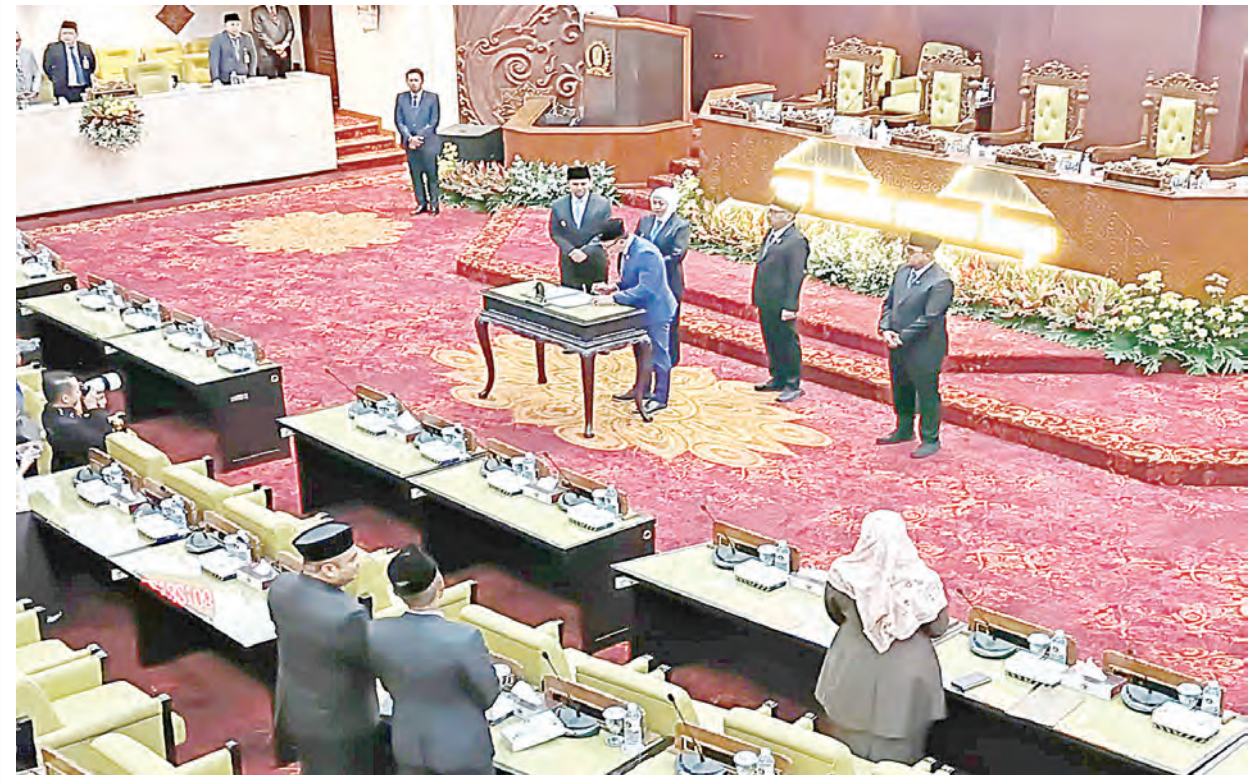
prasasti yang sekali dibuat lalu dianggap berlaku selamanya. Data harus hidup bersama perubahan kehidupan masyarakat," katanya.

Ia mendorong Pemkot Surabaya membangun pemutakhiran data secara berkala dengan melibatkan pemerintah, perangkat kewilayahan, dan masyarakat. Warga juga perlu memahami pentingnya memperbarui data ketika terjadi perubahan kondisi

■ Bersambung ke halaman 10

KIPRAH DPRD PROVINSI JAWA TIMUR

Sembilan Fraksi Setujui Raperda Penyertaan Modal Jamkrida Jawa Timur



Suasana sidang paripurna Pendapat Akhir Fraksi terhadap Penyertaan Modal pada Perusda Jamkrida Jawa Timur.

Surabaya, Memorandum

Sembilan fraksi di DPRD Jawa Timur menyatakan sikap menyetujui terhadap usulan Raperda terhadap Penyertaan Modal pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur.

Sembilan fraksi yang menyampaikan pendapat akhir adalah Fraksi PKB, Fraksi PDI-P, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi NasDem, Fraksi PAN, Fraksi PKS, Fraksi PPP-PSI.

Pernyataan ini disampaikan dalam pandangan akhir (PA) fraksi di sidang paripurna DPRD Jatim dalam proses pengambilan keputusan reperda menjadi perda yang disetujui DPRD Jatim dan Gubernur Jatim.

Hadir Ketua DPRD Jatim, Musyafak, Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono, dipimpin Wakil Ketua DPRD Jatim, Blegur Prijanggono. Turut hadir Gubernur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Darfak, serta Sekdaprob Jatim Adhi Karyono. Parupirna juga nampak hadir kepala OPD Provinsi Jatim.

Bleggur Prijanggono menye-

butkan, dalam paripurna seluruh fraksi menyampaikan pendapat akhir. "Terimah kasih untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi tentang usulan Raperda terhadap Penyertaan Modal pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur," terang Blegur.

Blegur yang juga Sekretaris DPD Partai Golkar Jatim ini, menjelaskan pendapat akhir fraksi merupakan proses pembahasan rancangan peraturan daerah yang harus dilalui. Penyertaan modal menjadi pembiayaan terhadap Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur.

"Kami berharap tambahan modal melalui perda ini, benar benar bisa mengawal kesejahteraan rakyat melalui peningkatan PAD dan fungsi sosial di masyarakat," sebut Blegur.

Blegur menyebutkan, seluruh



Blegur Prijanggono

fraksi dapat menyetujui Raperda Penyertaan Modal Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur menjadi peraturan daerah (perda).

Di kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan di hadapan sidang paripurna, bahwa pengambilan

keputusan pada penyertaan modal Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur. "Raperda sebagai regulasi untuk memperkuat keuangan dan kepemilikan BUMD terhadap Pemprov Jatim," sebut Khofifah.

Alasan penambahan modal, lanjut Gubernur Khofifah, permodalan sebagai upaya membantu pada permodalan UMKM usaha mikro di Jatim. "Pembahasan raperda sudah dibahas secara cermat," tegasnya. (day/lis/*)

Fraksi PKB Beri Catatan Jamkrida

FRAKSI PKB DPRD Jatim memberikan catatan terhadap Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur. Catatan ini, sebagai wujud agar tidak terjadi risiko.

"Fraksi PKB tidak ingin melihat nasib UMKM terganggu, karena lemahnya dan



Hikmah Bafaqih

kerapuhan terhadap pengolahan Jamkrida," sebut Hikmah.

Hikmah menyebut, terjadi paradoks inklusi, bahwa volume penjaminan meroket, UMKM yang ditolong merosot. Nilai penjaminan melonjak dari 5,8 triliun rupiah (pada 2020) menjadi 21,5 triliun rupiah (pada 2025).

Ironisnya, jumlah UMKM yang dibantu justru menyusut tajam dari 440.078 (pada 2022) menjadi hanya 274.116 (pada 2025). (day/*)

Fraksi PDI-P Penyertaan Modal Harus Tepat

PENYERTAAN modal terhadap pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur harus tepat de-

ngan kebijakan lebih tertib dan terukur, sehingga ada pijakkan hukum.

Sejak menyampaikan Pemandangan Umum, Fraksi PDI Perjuangan telah menempatkan penyertaan modal tersebut dalam kerangka kepentingan masyarakat dan keberlanjutan fiskal daerah.

"Kami menekankan perlunya arah kebijakan yang jelas, roadmap permodalan yang realistis, mitigasi risiko yang memadai, serta



Martin Hamonangan

indikator kinerja yang dapat diukur," tandas Martin. (day/lis/*)

Fraksi PAN Minta Tambahan Modal Mendesak

FEAKSI PAN ingatkan Pemprov Jatim untuk tidak mengganggu efisiensi anggaran dan kemampuan kapasitas APBD. Suli Daim juru bicara Fraksi PAN DPRD Jatim menyebutkan, tambahan modal untuk PT Jamkrida harus sepenuhnya diberikan kepada pelaku UMKM dan pelaku usaha mikro.

Modal dasar PT Jamkrida Jatim (Persero-

da) ditetapkan sebesar Rp 600 miliar, sementara total penyeratan modal daerah yang telah disetor Pemprov Jatim sejak tahun 2009 hingga 2015 baru mencapai Rp 179,5 miliar.

"Fraksi PAN mencermati bahwa selama kurang lebih sepuluh tahun terakhir (2015-2026) tidak terdapat penambahan penyertaan modal, sebelum akhirnya direncanakan kembali penambahan sebesar Rp 100 miliar melalui raperda ini," sebut Suli Daim. (day/lis/*)



Suli Daim



Pemkot Madiun Benah Anomali Data DTSEN

Madiun, Memorandum

Persoalan data desil dan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) terus diurai Pemkot dan BPS Kota Madiun.

Dalam rapat yang digelar di Ruang 13 Balai Kota Madiun pada Senin (7/9), satu per satu permasalahan anomali data berhasil diungkap.

“Kemarin masyarakat banyak yang kaget, tiba-tiba terjadi anomali yang biasanya di desil 1 sampai 5, tiba-tiba melonjak ke desil 10. Terjadi miss pada integrasi data BKKBN di tingkat

kementerian. Namun setelah dimutakhirkan, data semuanya sudah kembali normal,” ungkap Plt Wali Kota Madiun F Bagus Panuntun.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pemkot Madiun telah berkoordinasi Pusat Data dan Informasi (Pusdatin). Pun menginstruksikan seluruh lurah untuk menguasai dan mengendalikan data

warga di wilayah masing-masing secara detail.

Pendataan di tingkat kelurahan akan melibatkan berbagai unsur masyarakat, seperti LPMK, PKK, dan Karang Taruna. Data hasil validasi lapangan ini nantinya dieksekusi oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

“Nanti teman-teman di kelurahan akan lebih detail mana yang sudah mendapatkan bantuan dan yang tidak masuk desil tapi sebenarnya dia tidak mampu. Sehingga nanti kita intervensinya lebih mudah dalam melakukan program,” terangnya.

Di samping itu, Bagus mewanti-wanti masyarakat untuk tidak serampangan menginformasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Menurut dia, hal itu untuk mencegah penyalahgunaan data.



Rakor tindak lanjut data desil dan DTSEN berlangsung di Ruang 13 Balai Kota Madiun, Senin (7/9).

naan data.

“NIK-nya ini sekarang hati-hati. Yang KTP-nya dipinjam atau foto KTP dipinjam rada hati-hati.

Karena NIK ini yang nanti akan terintegrasi ke mana-mana,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang

sama, Kepala BPS Kota Madiun Abdul Aziz, menegaskan bahwa pemadanan DTSEN menggunakan NIK sebagai identitas tunggal.

Pemkot Madiun dan BPS pun mengimbau warga agar tidak sembarangan meminjamkan NIK atau KTP kepada orang lain, termasuk demi imbalan uang.

Penggunaan NIK oleh pihak lain misalnya untuk pembelian aset seperti kendaraan, akan tercatat atas nama pemilik KTP, sehingga secara otomatis meningkatkan skala desil dan berpotensi membatalkan kelayakan penerimaan bansos.

Selain urusan aset, BPS dan Pemkot Madiun juga menyoroti bahaya penyalahgunaan NIK untuk transaksi judi online (judol). “DTSEN atau pemerinkatan

desil sendiri sebenarnya tidak terkait langsung dengan judol. Namun, ketika penyaluran bansos dilakukan, warga yang terdeteksi melakukan transaksi judi online melalui rekening bank ber-NIK tersebut bisa dicoret atau dinyatakan tidak lulus sebagai penerima bansos,” jelas Aziz.

Secara keseluruhan, kondisi tingkat kesejahteraan warga Kota Madiun tergolong relatif baik secara skala nasional. Berdasarkan data, dari sekitar 72.000 kepala keluarga (KK) yang terdata di Kota Madiun, hanya 26 persen yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 5 secara nasional.

“Jadi jumlah KK yang terdata di Kota Madiun itu 72.000, 26 persennya itu desil 1 sampai desil 5,” pungkasnya. (ggi/nov)



Petani Desa Kare mulai mengembangkan tanaman kentang di lereng Gunung Wilis, Kabupaten Madiun.

Petani Kare Kembangkan Kentang Lereng Wilis

Madiun, Memorandum

Budi daya kentang bukan komoditas yang sejak awal akrab dengan petani di Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Para petani harus lebih dulu belajar mengenal tanaman hortikultura sebelum berani mengembangkan kentang.

Proses tersebut berlangsung secara bertahap sejak 2023. Berbekal pengalaman dan pengetahuan yang dibagikan sesama petani, mereka mulai mencoba berbagai tanaman hortikultura hingga akhirnya menemukan kentang sebagai salah satu komoditas yang sesuai dengan karakteristik wilayah lereng Gunung Wilis.

Seorang petani Desa Kare Dicky Irfian Cahya mengatakan, pada tahap awal petani masih dalam proses belajar. Pengetahuan mengenai budi daya hortikultura diperoleh melalui praktik langsung serta berbagi pengalaman antarpetlaku tani.

Dari proses tersebut, kemampuan petani terus berkembang hingga budi daya kentang mulai dilakukan dalam skala lebih luas.

“Awalnya kami belajar. Dulu enggak ada horti, kami belajar horti

dari teman, *sharing-sharing* kemudian kami coba dari tanaman horti dan akhirnya lanjut,” ujarnya saat dikonfirmasi Senin (7/9).

Seiring waktu, semakin banyak petani yang tertarik mengikuti pengembangan hortikultura. Bahkan, mayoritas petani yang terlibat merupakan kalangan milenial.

Pemilihan kentang juga bukan tanpa alasan. Karakteristik wilayah Kare yang berada di dataran tinggi dinilai sesuai untuk tanaman tersebut. Petani menyebut ketinggian tempat menjadi faktor penting karena tidak semua wilayah dapat ditanami kentang.

“Kami memilih kentang karena di sini sudah mencapai MDPL. Itu penting banget untuk tanaman kentang. Di bawah sini sudah enggak bisa ditanami kentang,” jelasnya.

Perjalanan dari tahap belajar hingga mampu membudidayakan kentang secara lebih luas kini mulai memberikan hasil. Luasan tanam di Kare telah mencapai sekitar 21 hektare, sementara pengembangan hortikultura secara keseluruhan melibatkan ratusan petani. (aji/nov)



Kondisi Pasar Hewan Ngawi.

Rehabilitasi Pasar Hewan Ngawi Digelontor Anggaran Rp 6,5 Miliar

Ngawi, Memorandum

Pemkab Ngawi mengalokasikan anggaran rehabilitasi Pasar Hewan Ngawi sebesar Rp 6,5 miliar.

Rehabilitasi pasar hewan yang berlokasi di Desa Kandangan, Kecamatan/Kabupaten Ngawi ini dilakukan setelah adanya keluhan masyarakat atas kondisi yang memprihatinkan.

Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Ngawi Yesi Widyarti menyampaikan, untuk perbaikan pasar hewan masuk dalam perubahan skala prioritas pembangunan daerah.

Terlebih anggaran tersebut setelah ada kebijakan dari Bupati Ngawi dari relokasi anggaran dari alun-alun diarahkan untuk penanganan jalan dan rehab pasar hewan. “Pasar hewan sudah

dianggarkan di P-APBD ini Rp 6,5 miliar,” katanya.

Yesi menyampaikan, anggaran tersebut meliputi pekerjaan pembangunan lapak hewan sapi, pembangunan los untuk pedagang, pembangunan kanter dan akses jalan sekeliling lapak sapi.

“Memang untuk tingkat kerusakan bangunan serta fasilitas jalan sekitar 80 persen, maka perlu adanya perbaikan untuk menunjang aktivitas jual beli,” terangnya.

Sebelumnya, perbaikan pasar hewan sendiri direncanakan pada 2025 lalu dengan pagu anggaran sekitar Rp 16 miliar. Namun, adanya kebijakan efisiensi anggaran kemudian dibatalkan. “Tahapan saat ini persiapan masuk proses tender di pengadaan barang dan jasa Setda Ngawi,” pungkasnya. (ris/dik/nov)

Madiun, Memorandum

Kecelakaan melibatkan dua truk terjadi di Perempatan Ngujur, Desa Kedondong, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Senin (7/9) sekitar pukul 04.30.

Benturan keras membuat satu truk tererosok hingga menghantam toko ritel Indomaret, sementara truk lainnya terguling di lokasi kejadian.

Kecelakaan tersebut melibatkan truk pengangkut kayu bermompolisi AG 8412YQ yang melaju dari arah selatan dan truk tanpa muatan bermomor polisi AE 9251 NF yang datang dari arah timur.

Kanitgakkum Satlantas Polres Madiun Ipda Andika Cahyono mengatakan, kedua kendaraan bertabrakan saat tiba di perempatan tersebut.

“Sesampainya di TKP kedua

truk saling bertumburan hingga mengakibatkan kedua kendaraan satu terguling dan satu kendaraan tererosok masuk ke Indomaret,” kata Andika.

Ia mengungkapkan, dugaan sementara kedua kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi sebelum tiba di perempatan. Kerasnya benturan membuat truk tanpa muatan terdorong hingga masuk ke area Indomaret.

Sementara truk pengangkut kayu kehilangan keseimbangan setelah tabrakan hingga akhirnya terguling. Muatan kayu yang dibawa truk tersebut juga harus dievakuasi petugas agar kendaraan dapat segera diderek.

“Tadi dari tim satlantas juga turut membantu mengevakuasi kayu agar dapat segera diderek, dan para korban saat ini sudah

Madiun, Memorandum

Pemakaman di Kota Madiun benar-benar terbatas. Buktinya, hasil kajian teknis penyediaan lahan pemakaman umum mencatat 70,08 persen tempat pemakaman umum (TPU) memiliki tingkat keterisian tinggi.

Dari 93 pemakaman umum yang tersebar di Kota Madiun, total luasanya mencapai 29,82 hektare. Padahal kebutuhan lahan pemakaman Kota Madiun berdasarkan jumlah penduduk diproyeksi mencapai 31,64 hektare hingga 2041.

Artinya, kebutuhan berdasarkan metode tersebut lebih besar sekitar 1,82 hektare dibandingkan luas pemakaman yang tersedia saat ini.

Kabid Prasarana Utilitas Umum, Pertamanan, PJU, dan

Pemakaman Disperkim Kota Madiun Andi Anto mengakui ketersediaan lahan makam tidak merata di setiap wilayah.

“Terkait lahan makam, memang ada beberapa kecamatan yang kekurangan. Tapi, ada juga kecamatan yang lahannya masih luas,” ujarnya, Senin (7/9).

Persoalan paling mendasak terlihat di Kecamatan Taman. Berdasarkan kajian kebutuhan yang mengacu pada jumlah penduduk, kapasitas lahan pemakaman di kecamatan tersebut hanya mampu memenuhi kebutuhan hingga 2026.

Kondisi berbeda terdapat di Kecamatan Manguharjo. Ketersediaan lahan pemakaman di wilayah tersebut diproyeksikan masih dapat memenuhi kebutuhan hingga lebih dari 2041.

Ngawi, Memorandum

Krisis air bersih di wilayah Kabupaten Ngawi semakin meluas.

Hingga saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ngawi mencatat 19 dusun tersebar di 15 desa di 7 kecamatan.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Ngawi Yudha Herlambang menjelaskan, bahwa dampak kemarau kian meluas hingga menyebabkan krisis air bersih.

“Saat ini wilayah kekeringan di Ngawi meluas menjadi 19 dusun di 15 desa tersebar di 7 kecamatan,” katanya.

Yudha menyampaikan, untuk daerah yang terdampak kekeringan ini mengacu pada tingkatan dusun. Adapun untuk wilayah terdampak kekeringan meliputi Kecamatan Bringin di Desa Kenongorejo, Bringin, dan Suruh, dan Kecamatan Pitu meliputi Desa Ngancar, Bangunrejo Lor, Cantel, dan Selopuro.

Kemudian, Kecamatan Kasreman yakni Desa Kiyonten dan Gunung Sari juga Kecamatan Ngawi meliputi Desa Karang Tengah Prandon, Banyuurip, dan Ngawi.

Tak hanya itu, wilayah terdampak lainnya berada di Desa Rejuno, Kecamatan Karangaji, Desa Pelangor, Kecamatan Kedunggalur, serta Desa Pandean Kecamatan Karanganyar.

Dijelaskan, dari 19 Dusun tersebut terdapat 715 kepala keluarga dengan jumlah 1.884 jiwa.

Sejauh ini, BPBD berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI), Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, lembaga sosial, partai politik, hingga komu-

nitass masyarakat dalam melakukan *dropping* air bersih dengan kapasitas 5.000 liter dan 6.000 liter per tangki air.

Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) musim kemarau di Indonesia terjadi pada Agustus hingga September ini. “Saat ini meningkat *dropping* air rata-rata empat kali dalam sehari,” pungkasnya. (ris/dik/nov)



Tingkat keterisian pemakaman di Kota Madiun cukup tinggi.

Sedangkan dalam kajian yang sama, kapasitas lahan makam Kecamatan Kartoharjo tercatat hanya mampu memenuhi kebutuhan sampai 2023. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan ketersediaan lahan pemakaman antarwilayah.

Namun, proyeksi kebutuhan

berubah signifikan ketika perhitungan menggunakan jumlah penduduk meninggal. Dengan metode tersebut, kebutuhan lahan pemakaman hingga 2041 hanya 12,54 hektare.

Di tengah keterbatasan wilayah Kota Madiun, pemkot tidak memiliki banyak ruang untuk



Petugas BPBD Ngawi saat melakukan dropping air bersih di Desa Kenongorejo, Kecamatan Karangaji.

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN mandiri

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk akan melakukan lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id atas barang jaminan (objek lelang) milik Debitur atas nama :

LIARSIH

Sebidang tanah seluas 4.057 m² berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri ataupun tertanam di atasnya sesuai SHM No. 119 An. **LIARSIH**, yang terletak di Desa Sendangrejo, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Boponegoro, Provinsi Jawa Timur.

(Harga Limit Rp. 799.196.000,- ;uang jaminan lelang Rp. 80.000.000,-)

Pelaksanaan Lelang :

- Hari : Selasa
- Tanggal : 22 September 2026
- Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
- Batas Akhir Penawaran : 22 September 2026 pukul 10.35 WIB (sesuai waktu server)
- Alamat Domain : lelang.go.id
- Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKN) Madiun

Jl. Seroayu Timur No. 141 Madiun

Penetapan Pemegang : setelah batas akhir penawaran

Peserta lelang diharap menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain di atas.

Syarat-syarat lelang :

- Calon peserta lelang dapat melihat objek lelang di lokasi sejak diumumkan.
- Lelang dilaksanakan dengan penawaran melalui aplikasi lelang internet yang di akses pada alamat domain : lelang.go.id.
- Calon peserta lelang mendaftarkan diri pada aplikasi Lelang Internet alamat domain butir 2 diatas, kemudian mengaktifkan akun dan merekam (scan) KTP dan NPWP dan nomor rekening bank atas nama sendiri.
- Peserta yang bertindak sebagai kuasa badan usaha diwajibkan mengunggah surat kuasa notarial, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, NPWP perusahaan dalam satu file.
- Peserta Lelang diwajibkan menyetor uang jaminan sesuai dengan pengumuman lelang dan harus sudah efektif paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Lelang.
- Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) peserta lelang, yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun peserta lelang.
- Penawaran lelang dimulai dari nilai limit dan dapat diajukan berkali-kali sampai batas waktu sebagaimana tersebut diatas.
- Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemegang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara.
- Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is).
- Pemegang Lelang dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan/dibeli olehnya. Apabila terdapat kekurangan/keusahan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Pemegang Lelang tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga.
- Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah ditinjau bangunan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada.
- Informasi lebih lanjut tentang objek lelang, dapat menghubungi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Retail Asset Management VII Jawa 2 Telp. (024) 3521524, (024) 3584230 atau KPKNL Madiun Telp. (0351) 468803.

Madiun, 08 September 2026
Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Retail Asset Management VII Jawa 2

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN mandiri

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk akan melakukan lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id atas barang jaminan (objek lelang) milik Debitur atas nama :

LIARSIH

Sebidang tanah seluas 5.585 m² berikut segala sesuatu yang berdiri ataupun tertanam diatasnya sesuai SHM No. 336 an. **TAMSAH B. MUR**, yang terletak di Desa Sendangrejo, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Boponegoro, Provinsi Jawa Timur.

(Harga Limit Rp. 342.000.000,- ;uang jaminan lelang Rp. 35.000.000,-)

Pelaksanaan Lelang :

- Hari : Selasa
- Tanggal : 22 September 2026
- Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
- Batas Akhir Penawaran : 22 September 2026 pukul 10.40 WIB (sesuai waktu server)
- Alamat Domain : lelang.go.id
- Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKN) Madiun

Jl. Seroayu Timur No. 141 Madiun

Penetapan Pemegang : setelah batas akhir penawaran

Peserta lelang diharap menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain di atas.

Syarat-syarat lelang :

- Calon peserta lelang dapat melihat objek lelang di lokasi sejak diumumkan.
- Lelang dilaksanakan dengan penawaran melalui aplikasi lelang internet yang di akses pada alamat domain : lelang.go.id.
- Calon peserta lelang mendaftarkan diri pada aplikasi Lelang Internet alamat domain butir 2 diatas, kemudian mengaktifkan akun dan merekam (scan) KTP dan NPWP dan nomor rekening bank atas nama sendiri.
- Peserta yang bertindak sebagai kuasa badan usaha diwajibkan mengunggah surat kuasa notarial, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, NPWP perusahaan dalam satu file.
- Peserta Lelang diwajibkan menyetor uang jaminan sesuai dengan pengumuman lelang dan harus sudah efektif paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Lelang.
- Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) peserta lelang, yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun peserta lelang.
- Penawaran lelang dimulai dari nilai limit dan dapat diajukan berkali-kali sampai batas waktu sebagaimana tersebut diatas.
- Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemegang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara.
- Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is).
- Pemegang Lelang dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan/dibeli olehnya. Apabila terdapat kekurangan/keusahan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Pemegang Lelang tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga.
- Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah ditinjau bangunan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada.
- Informasi lebih lanjut tentang objek lelang, dapat menghubungi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Retail Asset Management VII Jawa 2 Telp. (024) 3521524, (024) 3584230 atau KPKNL Madiun Telp. (0351) 468803.

Madiun, 08 September 2026
Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Retail Asset Management VII Jawa 2



“Sikap pedagang yang menolak bayar tetap kami catat sebagai tagihan. Nanti mekanisme penagihannya sesuai arahan pimpinan,” tegasnya. (roh/fai/nov)



Dewan dan Pemkab Sepakati P-APBD 2026

Pengadaan Mobdin Camat, Renovasi Toilet SD hingga Videotron Disetujui

Magetan, Memorandum

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magetan memberikan lampu hijau untuk sejumlah usulan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2026 yang diusulkan Pemkab Magetan, Senin (7/9).

Dewan menerapkan verifikasi ketat terkait usulan eksekutif pada P-APBD sesuai porsi anggaran sesuai kebutuhan.

"Porsi yang kita sesuaikan. Seperti yang untuk sarpras kemarin kan pengajuannya ada sekian, dan ini kita verifikasi ulang

dari pengajuan 90 tinggal 28, jadi tinggal satu miliar yang untuk sarana dan prasarana sekolah yang memprihatinkan," kata Ketua DPRD Magetan, Riyin Nur Asiyah, Senin (7/9).

Selain itu, usulan ken-
daraan dinas Camat juga

disetujui dengan pertim-
bangan, sudah besarnya
anggaran untuk infrastruk-
tur jalan yang menyentuh
hampir Rp 35 miliar. Mobil
dinas tersebut nantinya
diharapkan bisa mem-
berikan kontribusi besar
dalam kegiatan yang akan
datang salah satunya Pil-

kades serentak.

"Dibandingkan infra-
struktur itu hanya 5%nya
saja, jadi mohon untuk
kita memang dituntut un-
tuk bijak dalam anggar-
an. Akhir tahun ini kita
akan ada penataan atau
pembentukan BPD desa
serentak, kemudian nanti

akhir Desember nanti pun
sudah mulai persiapan
untuk pilkades serentak,"
kata Riyin, Senin (7/9).

"Jadi membutuhkan
dari Kecamatan akomoda-
si luar biasa ke desa-desa,
kalau kita tidak support
sistem dengan armada
baru kita, mayoritas sudah

banyak yang tidak bisa
dipakai. Jadi sudah bukan
rusak lagi, mayoritas su-
dah tidak bisa dipakai. Ma-
kanya tetap kita anggarkan
dan nilainya hanya 5% dari
penambahan anggaran
yang kita berikan untuk
infrastruktur," beber dia.
Termasuk belanja vi-

deotron, juga dilaksana-
kan pada Perubahan Ang-
garan Keuangan (PAK)
2026, yang disesuaikan
dengan Standar Satuan
Harga (SSH). Selain itu,
anggaran untuk toilet pada
satuan pendidikan juga
mengalami perubahan
dari usulan.

"Akhirnya cuma 1,1,
terus ada beberapa tempat
toilet yang sangat tidak la-
yak dipakai, sama Bappeda
untuk tambahan renovasi
itu jadi di DPRD itu nam-
bah 1,2 miliar," pungk-
kas Ketua DPRD Magetan.
(adv/jkn/rik/fdn).



Wakil Bupati Magetan bersama pimpinan DPRD Magetan menandatangani nota kesepakan rancangan perubahan KUA dan PPAS TA 2026.

KBPR TAKERAN
Jl. Raya Takeran 173 Takeran Magetan
Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan 63383
Telp. (0351) 493974, e-mail : kbprtakeran@gmail.com

PENGUMUMAN LELANG KEDUA EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Merujuk pada Pengumuman Lelang Pertama tertanggal 24 Agustus 2026, berdasarkan Pasal 6 Undang – undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, KBPR Takeran akan melaksanakan penjualan umum/lelang Eksekusi Hak Tanggungan secara E-Auction (Open Bidding) dengan penantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun atas Debitur DWI IRAWAN dengan obyek berupa :

NO	OBJEK LELANG	NILAI LIMIT	UANG JAMINAN
1	1. Sebidang tanah pekarangan dengan No. SHM 630 luas tanah 570 m ² atas nama DWI IRAWAN terletak di Desa/Kelurahan Kenongomulyo, Kecamatan Ngutironadi, Kabupaten Magetan	Rp 40.000.000	Rp 5.000.000
2	2. Sebidang tanah beserta bangunan dengan No. SHM 630 luas tanah 840 m ² atas nama DWI IRAWAN terletak di Desa/Kelurahan Kenongomulyo, Kecamatan Ngutironadi, Kabupaten Magetan	Rp 210.000.000	Rp 25.000.000

KETERANGAN:
Nominal uang jaminan yang disetorkan ke rekening Virtual Account (VA) masing-masing peserta dan jumlahnya harus sama dengan nominal uang jaminan yang dipersyaratkan. Uang jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Madiun selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Lelang (Senin, 23 September 2026)

PERSYARATAN LELANG:
1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id, syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada alamat website diatas.
2. Obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya **as is** dengan segala konsekuensi biaya tertanggung atas obyek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui kondisi obyek lelang dan bertanggung jawab atas obyek lelang yang dibeli, karena itu peserta lelang diwajibkan untuk mengetahui / memeriksa obyek yang akan dilelang dengan baik dan teliti.
3. Apabila karena suatu hal terjadi pembatalan lelang terhadap barang jaminan / agunan tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan / peminat lelang tidak dapat menuntut dalam bentuk apapun baik pidana maupun perdata kepada KPKNL Madiun dan KBPR Takeran.
4. Segala biaya yang mungkin timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
5. Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana obyek lelang berada.
6. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi KBPR Takeran di Jl. Raya Takeran 173 Takeran Magetan Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan Telp. (0351) 493974 atau 081335879453 (Wiwik Purwati) atau KPKNL Madiun beralamat di Jl. Serayu No.141, Banjarejo, Kec. Taman, Kota Madiun No. Telp (0351) 466603.

Cara Penawaran Lelang	Open Bidding dengan mengakses website: www.lelang.go.id
Pelaksanaan Lelang	Selasa, 22 September 2026
Waktu Penawaran	Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran	Selasa, 22 September 2026, pukul 11.00 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain	www.lelang.go.id
Bea Lelang Pembeli	2% (dua persen) dari harga lelang (harga terbentuk)
Pelaksanaan Lelang	5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Tempat pelaksanaan lelang	KPKNL Madiun beralamat di Jl. Serayu No.141, Banjarejo, Kec. Taman, Kota Madiun

Magetan, 08 SEPTEMBER 2026
Hormat Kami,
KBPR TAKERAN
ttd
(WIWIK PURWATI, S.E.)
DIREKTUR UTAMA

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 Undang – Undang Hak Tanggungan No 4 Tahun 1996, PT. BPR ARTHAYA INDOTAMA PUSAKA akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Secara E-Auction (Open Bidding) dengan penantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun, terhadap aset jaminan/ agunan debitur :

DEBITUR	OBJEK LELANG	NILAI LIMIT	UANG JAMINAN
SUIARNO	Sebidang tanah non pertanian dengan SHM Nomor 00554 yang terletak di Desa/Kelurahan Ringinagung, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan dengan luas tanah 112 m ² , atas nama SUMIATI	Rp 190.000.000	Rp 30.000.000

KETERANGAN:
o Nominal uang jaminan yang disetorkan ke rekening Virtual Account (VA) masing-masing peserta dan jumlahnya harus sama dengan nominal uang jaminan yang dipersyaratkan. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis kepada masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
o Obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya **as is** dengan segala konsekuensi biaya tertanggung atas obyek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui kondisi obyek lelang dan bertanggung jawab atas obyek lelang yang dibeli, karena itu peserta lelang diwajibkan untuk mengetahui / memeriksa obyek yang akan dilelang dengan baik dan teliti.
o Apabila karena suatu hal terjadi pembatalan lelang terhadap barang jaminan / agunan tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan / peminat lelang tidak dapat menuntut dalam bentuk apapun baik pidana maupun perdata kepada KPKNL Madiun dan PT. BPR Arthaya Indotama Pusaka.
o Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana obyek lelang berada.
o Uang jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Madiun selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Lelang.

Cara Penawaran Lelang	Open Bidding dengan mengakses website: lelang.go.id
Pelaksanaan Lelang	Selasa, 22 September 2026
Batas akhir waktu penawaran	22 September 2026, 10.20 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain	lelang.go.id
Bea Lelang Pembeli	2% (dua persen) dari harga lelang (harga terbentuk)
Pelaksanaan Lelang	5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang

Tempat pelaksanaan lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun
Jl. Serayu Timur No. 141 Kota Madiun Jawa Timur.

Informasi lebih lanjut hubungi PT.BPR ARTHAYA INDOTAMA PUSAKA
Alamat : Jalan Ahmad Yani No. 44, Bangunsari Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun
Telp. (0351) 383224 / 082248145140 (Pramuda)

Magetan, 8 September 2026
PT. BPR ARTHAYA INDOTAMA PUSAKA

KPKNL Madiun
BPR. Arthaya Indotama Pusaka

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 PT. BPR Ekadharna Bhinarahaja, melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun akan melaksanakan lelang eksekusi atas barang tetap berupa :

No.	Barang Jaminan Yang Akan Dilelang	Nilai Limit (Rp)	Uang Jaminan (Rp)
1.	Sebidang Tanah Pertanian Sertifikat Hak Milik Nomor : 2239 Luas : 2566 M ² Terletak Di Desa Dompok Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi Propinsi Jawa Timur Atas Nama : Juminatun	225.000.000,-	72.000.000,-

Keterangan :
– Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan;
– Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Madiun selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
– Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.

Persyaratan Lelang :
1. Memiliki akun yang telah terverifikasi ada website <https://lelang.go.id>
2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas
3. Pelunasan Harga Lelang dan Bea Pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melakukan pelunasan sesuai ketentuan tersebut maka dinyatakan Wanprestasi dan Uang Jaminan dari peserta lelang akan disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan lain-lain
4. Obyek lelang tersebut diatas dijual dengan kondisi apa adanya dan peserta lelang dianggap telah mengetahui/ memahami kondisi obyek lelang
5. Apabila suatu hal terjadi gugatan, tuntutan dan pembatalan/ penundaan terhadap pelaksanaan lelang obyek tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan/ peminat lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan/ gugatan kepada KPKNL Madiun maupun PT. BPR Ekadharna Bhinarahaja
6. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi PT. BPR Ekadharna Bhinarahaja (0351) 439872 / Tri Widedo Subianto 085735825805 / Wayan 081242450590.

Pelaksanaan Lelang :
Hari : Selasa
Tanggal : 22 September 2026
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 22 September 2026 pukul 11:40 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain : lelang.go.id
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (Kpnl) Madiun
Jl. Serayu Timur No.141 Madiun
Penetapan Pemegang : setelah batas akhir penawaran

Magetan, 08 September 2026
Ttd
PT. BPR Ekadharna Bhinarahaja

BLITAR

KABIRO: Abdul Aziz - NOMOR WA: 0811318627

Wali Kota Syaquul Muhibbin Didemo Wawali

Dipicu Kisruh Organisasi KONI

Blitar, Memorandum

Polemik KONI dengan Pemkot Blitar hingga kini belum juga usai. Terbaru, ratusan atlet dari berbagai cabang olahraga demo Wali Kota Blitar Syaquul Muhibbin mendesak untuk segera mencairkan dana hibah.

Alih-alih menemui mas-
sa, Wali Kota Blitar Syaquul
Muhibbin cuek dan mem-
ilih untuk meninjau pro-
gram pembangunan fisik di
sejumlah titik. Yang unik,
demo juga diikuti Ketua Ha-
rian KONI Kota Blitar yang
juga Wakil Wali Kota Blitar,
Elim Tyu Samba.

Elim menganggap saat
ini roda organisasi terkesan
mandek. Pembinaan pun
tak jelas perkembangannya
buntut dari dana hibah yang
belum dicairkan.

"Jangankan dicairkan,
Gedung KONI Kota Blitar
saja digembok tidak boleh

ditempati. Kami KONI su-
dah berkirin surat audiensi
tiga kali. Tetapi tidak ada titik
temu," keluh Elim, Senin
(7/9).

Sebelum demo, Wali
Kota Syaquul Muhibbin dan
Wakil Wali Kota Elim Tyu
Samba duduk bareng pada
agenda rapat paripurna di
DPRD Kota Blitar. Usai pari-
purna, Elim turun bersama
massa, sementara wali kota
keluar ngacir cek pemba-
ngunan fisik..

Konflik antara KONI de-
ngan Pemkot Blitar sudah
berlangsung lama. Itu terjadi
sesaat setelah musyawarah



Wakil Wali Kota Blitar Elim Tyu Samba saat orasi di depan Gedung DPRD.

olahraga kota atau musorkot
pada pertengahan 2026 lalu.
Saat itu, musorkot mengha-
silkan ketua umum yakni
Samanhudi Anwaryang juga

mantan wali Kota Blitar.
Sementara Elim Tyu
Samba didapuk sebagai
ketua harian. Sejak agen-
da itulah, kantor KONI di

Jalan HOS Cokroaminoto
digembok oleh Pemkot Bli-
tar dalam hal ini Dispora.
Bukan hanya itu, kendaraan
operasional juga ditarik.

Puncaknya, dana hibah seki-
tar Rp 2 miliar tak dicairkan
ke KONI.
Kembali ke pernyataan
Elim Tyu Samba, demo para
atlet dari cabor itu puncak
dari kekecewaan. Pasalnya,
saat ini pembinaan man-
dek. Apalagi, tak lama lagi
bakal ada gelaran pekan
olahraga tingkat provinsi
atau porprov.
Administrasi organisasi
pun tak bisa dilakukan ka-

rena KONI tak punya kantor
resmi. Surat permintaan
audiensi yang dilayangkan
pun tak pernah digubris. "Ini
masalah masa depan atlet,"
kata Heru Santoso, salah
satu perwakilan massa.
Ada dua lokasi yang
menjadi sasaran demo.
Yakni Gedung DPRD Kota
Blitar dan kantor wali kota.
Di Gedung DPRD massa di-
temui ketua DPRD yang juga
pengurus cabor persatuan

tenis meja.
Ketua dewan sebenar-
nya sudah menyetujui dana
pembinaan, tetapi bola ada
di pemkot. Tak puas dengan
jawaban, akhirnya mas-
sa menuju ke kantor wali
kota. Aliih-alih ditemui, wali
kota malah memilih untuk
cek pembangunan fisik di
sejumlah lokasi. Massa di-
temui Pj Sekda Tri Iman
Prasetyono yang hanya me-
nampung aspirasi. (dul/fdn)

Berangkat Sekolah, Pelajar SMKN di Nglegok Tewas Kecelakaan

Blitar, Memorandum

Kecelakaan maut terjadi di
Jalan Raya Kelurahan
Tawangsari, Kecamatan
Garum, Kabupaten Blitar.
Pelajar SMKN 1 Nglegok
kelas X tewas usai terlibat
kecelakaan pada Senin,
(7/9).

Informasi dihimpun
menyebutkan kecelakaan
melibatkan tiga pemotor.
Tiga motor itu yakni Honda
Vario, Yamaha Mio dan Hon-
da Beat. Sementara korban
yakni, ANL (16) warga Desa
Tingal, Kecamatan Garum,
Kabupaten Blitar yang meng-
endarai Honda Vario.
"Untuk yang meninggal



Petugas saat evakuasi korban kecelakaan.

dunia adalah pengendara
Honda Vario, pelajar dari
sekolah di Nglegok," kata

Kepala Seksi Humas Polres
Blitar, Aiptu Saiful Muheni,
Senin (7/9).

Nah, apes ketika me-
nabrak Yamaha Mio, korban

jatuh dari ambruk ke kanan.
Padahal, dari arah berla-
nawan ada motor Honda
Beat yang dikemudikan
DPS (19) warga Desa Slorok,
Kecamatan Garum, Kabu-
upaten Blitar. "Korban pun
benturan dengan motor
dari arah berlawanan hingga
meninggal dunia," katanya.
Polisi yang dilapori
segera evakuasi dan olah
tempat kejadian perkara.
Kasus kecelakaan ditangani
aparatur Satlantas Polres Bli-
tar. (dul/fdn)

KEHILANGAN

STNK AG 6469 OT SOEPRAVITNO DSN
SELOPURO RT 02/02 KEC WILING KAB BLITAR

Magetan 8 SEPTEMBER 2026
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk.
Kantor Cabang Batu
Pemimpin Cabang

